

RANCANGAN AWAL

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

KECAMATAN SAMBOJA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT SAMBOJA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR :P. 001 /KEC.SJA/SK//1/2025

TENTANG

PERSONALIA PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN 2025-2029
OPD KANTOR CAMAT SAMBOJA

CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan pengelolaan penyelenggaraan rutinitas kerja berjalan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Personalia Tim Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan 2025-2029 pada Organisasi Perangkat Daerah KECAMATAN SAMBOJA Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ;
- b. Untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dan diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.

2. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. NOMOR 566/SK BUP/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;

3. Berdasarkan RKA dan DPA Belanja Satuan Perangkat Daerah KECAMATAN SAMBOJA Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

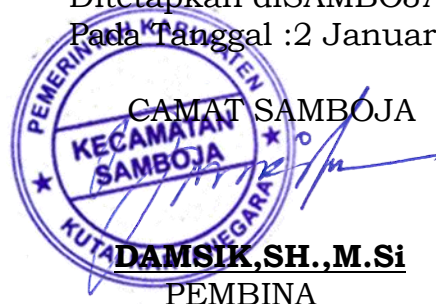
MENETAPKAN :

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **2 Januari 2025** menetapkan Personalia Penyusunan Renstra Kecamatan 2025-2029 pada Organisasi Perangkat Daerah KECAMATAN SAMBOJA Kabupaten Kutai Kartanegara :

No	NAMA	JABATAN	KETARANGAN
1	DAMSIK,SH.,M.Si	PENGARAH / PENANGGUNGJAWAB	CAMAT
2	AMIR LUFNI,S.Sos.,M.Si	KETUA	SEKCAM
3	MUHAMMAD ALIDIN,S.Sos	SEKRETARIS	KASI PMD
4	SYARIFUDDIN,S.Sos	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
5	AHMAD SAHYUDI,S.Pd	ANGGOTA	KASI PELAYANAN UMUM
6	ERY WINARTO,S.Sos	ANGGOTA	KASUBAG. UMUM, TATALAKSANA DANKEPEGAWAIAN
7	BURHAN,SKM	ANGGOTA	KASI KESOS
8	ANTUNG NANI HARIYANI	ANGGOTA	KASUBAG. PENYUSUNAN PROG KEU
9	STAF BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
10	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
11	STAF BAGIAN PMD	ANGGOTA	
12	STAF BAGIAN PELAYANAN UMUM	ANGGOTA	
13	STAF BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
14	STAF BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	ANGGOTA	
15	STAF BAGIAN TRANTIB	ANGGOTA	

- KEDUA : Personalia yang diangkat dalam jabatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada CAMAT SAMBOJA selaku atasan/pimpinan OPD KECAMATAN SAMBOJA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA Organisasi Perangkat Daerah KECAMATAN SAMBOJA Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di SAMBOJA
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



NIP. 19690414 2007011 031

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara di **Tenggarong**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di **Tenggarong**
3. Kepala Inspektorat Kutai Kartanegara di **Tenggarong**
4. Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara di **Tenggarong**
5. Yang bersangkutan di **Tenggarong**
6. Peringgal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Samboja ini berpedoman kepada Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Samboja pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Samboja ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Aamiin.



Camat Samboja

DAMSIK,SH.,M.Si
NIP. 196904142007011031

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	1
BAB 1	3
PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3.1 MAKSUD	7
1.3.2 TUJUAN	7
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II	11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
2.1.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH	42
2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SAMBOJA	52
KELOMPOK SASARAN PELAYANAN.....	58
2.1.5 TANTANGAN DAN PELUANG PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN	59
2.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	59
2.2.1 PERMASALAHAN	59
2.1.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	69
BAB III	104
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	104
3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SAMBOJA	104
3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN SAMBOJA	105

STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025- 2029	109
BAB IV	114
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA.....	114
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	114
4.1.1 PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	139
BAB V	167
PENUTUP.....	167

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045. Surat Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

Kecamatan Samboja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai potensi sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan, serta keanekaragaman hayati yang tinggi, Samboja memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberikan peluang dan tantangan baru yang memerlukan perencanaan

strategis untuk menghadapi dinamika pembangunan pada periode 2025-2029.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Samboja menghadapi perubahan yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peningkatan kebutuhan infrastruktur, pertumbuhan populasi, serta tekanan pada sumber daya alam menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana strategis ini. Pendekatan yang holistik dan berbasis data diperlukan untuk menjamin pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samboja ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahn Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
12. Surat Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2039;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil.
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samboja Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menerjemahkan visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ke dalam program dan kegiatan operasional di tingkat kecamatan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi perangkat daerah Kecamatan Samboja dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara terarah, efektif, dan akuntabel hingga akhir periode RPJMD.

1.3.2 TUJUAN

1. Menjabarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 Untuk memastikan arah pembangunan di Kecamatan Samboja selaras dengan visi, misi, serta tujuan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
3. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kecamatan.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Samboja berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Samboja Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB 1 Pendahuluan

- Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Samboja.

2. BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- Membahas tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samboja ini untuk memaksimalkan pelayanan dan mendukung pembangunan yang merata serta berkelanjutan.

3. BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

4. BAB 4 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidan Urusan

- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.
- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030

5. BAB 5 Penutup

- Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Samboja terletak di pesisir selatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Wilayah ini berada sekitar 108 km dari Tenggarong, ibu kota kabupaten, dan 93 km dari Samarinda, ibu kota provinsi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi "Kecamatan Samboja Dalam Angka 2024", luas wilayah Kecamatan Samboja mencapai 1.045,90 km². Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, Kecamatan Samboja telah dimekarkan menjadi dua wilayah: Kecamatan Samboja dan Kecamatan Samboja Barat. Setelah pemekaran,

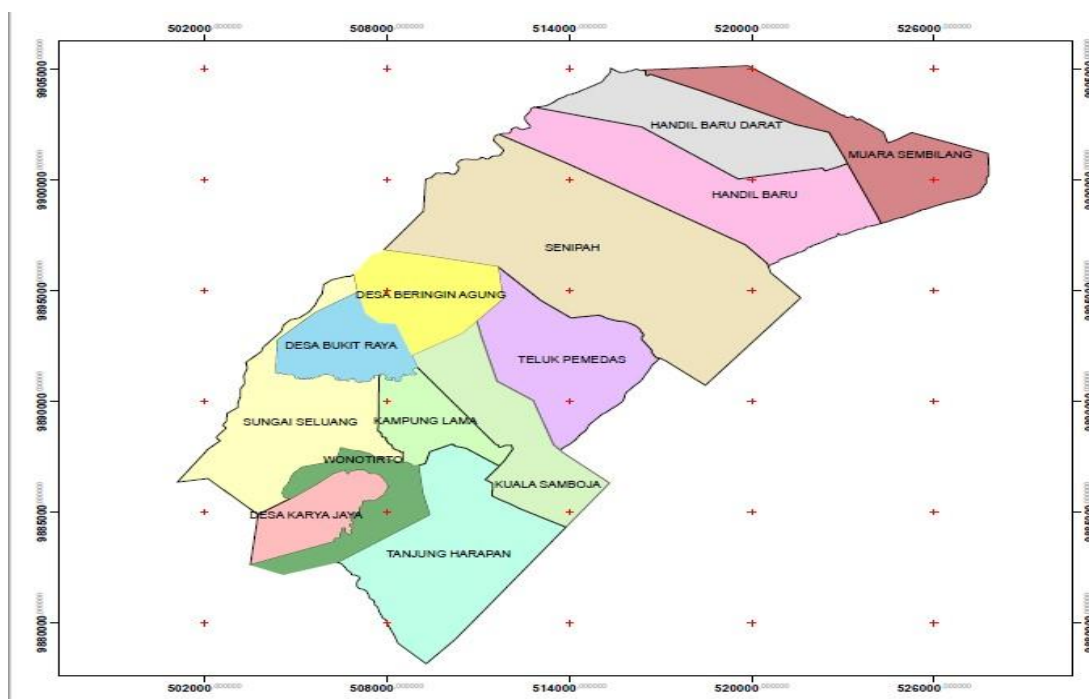
Kecamatan Samboja memiliki luas wilayah sekitar 284,93 km².

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kecamatan Samboja mencapai 66.617 jiwa pada tahun 2020. Wilayah ini terdiri dari 10 kelurahan dan 3 desa, dengan total 132 Rukun Tetangga (RT) di kelurahan dan 33 RT di desa. Kecamatan Samboja memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta menjadi jalur transportasi penting bagi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir

Batas- batas Wilayah Kecamatan Samboja

Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa
Sebelah Timur : Selat Makassar
Sebelah Selatan : Kecamatan Samboja Barat
Sebelah Barat : Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan
Loa Janan,

Gambar 1.Peta Wilayah Kecamatan Samboja



Tabel 1.DATA LUAS WILAYAH KELURAHAN/DESA DAN JUMLAH RT

No	Nama Desa	Luas Wilayah Desa/ Kelurahan (Km2)	Jumlah RT
1	Sei Seluang	27,54014	17
2	Wonotirto	11,181442	8
3	Tanjung Harapan	22,046089	11
4	Samboja Kuala	15,332926	20
5	Sanipah	59,323022	18
6	Handil Baru	33,591616	14
7	Muara Sembilang	22,166995	14

8	Teluk Pemedas	24,323348	10
9	Kampung Lama	10,541588	9
10	Handil Baru Darat	21,955600	12
11	Karya Jaya	10,047668	10
12	Bukit Raya	11,807128	12
13	Beringin Agung	15,067684	11
TOTAL		284,925246	166

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Pada maka tugas pokoknya adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

* Fungsi dari Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan; pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan

URAIAN TUGAS CAMAT :

- a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan.
- b) Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugas umum pemerintahan.

- d) Merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- e) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- f) Merumuskan kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pada seksi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- g) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- h) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- i) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan
- j) Mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum
- k) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- l) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
- m) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

- n) Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek-aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan mencakup penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- o) Merencanakan, Mengelola, Mengendalikan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- p) Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian program dan Kegiatan ditingkat kecamatan.
- q) Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati
- r) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- s) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut Bidang Tugas dan Tanggung Jawabnya
- t) Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Strategik serta Kebijakan Operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Seksi Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan pelayanan Umum.

- u) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat dibantu oleh:

- I. **Sekretaris Camat** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam tupoksi sekretaris camat sbb :
- a) Menyusun Rencana Kerja Sekertariat Kecamatan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
 - b) Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
 - c) Mengkonsultasikan kegiatan Sekertariat yang bersifat Urgen kepada Camat
 - d) Memberikan saran dan masukan kepada Camat tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
 - e) Melaksanakan ketatausahaan, Tata Naskah Dinas, urusan kearsipan serta perpustakaan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.

- g) Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan
- h) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak- Pajak Pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan.
- i) Mengkoordinasikan laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- j) Menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan laporan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.
- k) Menyiapkan bahan-bahan penyuluhan kepada instansi terkait dan masyarakat dibidang Dokumentasi dan Informasi.
- l) Melakukan Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas.
- m) Menyiapkan Bahan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Kantor, Pembinaan Serta Pengembangan Pegawai.
- n) Menyelenggarakan proses Administrasi Perijinan Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah

yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati

- o) Mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan Urusan Umum, Kerumahtanggaan, Keuangan dan Kepegawaian dilingkungan Kecamatan.
- p) Mengkoordinasikan Inventarisasi dan Mempersiapkan Urusan Penghapusan Barang
- q) Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas dan Menginventarisasi Permasalahan Sekertariat serta mencari alternatif pemecahannya.
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesektariatan
- s) Melaksanakan dan melaporkan Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Camat dibantu :

I. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan Menilai Hasil Kerja Bawahan
- b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Umum berdasarkan skala Prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

- d) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan yang bersifat Urgen kepada Sekretaris
- e) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Kepegawaian
- g) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan layanan administrasi dalam lingkup Kecamatan
- h) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Kecamatan, meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol.
- i) Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan laporan untuk penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap akhir tahun.
- j) Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak berlaku.
- k) Meneliti dan memeriksa hasil pengetikan dan pengadaan.
- l) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.

- m)Menyusun, mendistribusikan Rencana Kebutuhan Perlengkapan, Daftar Inventrasisasi dan Perlengkapan Kantor.
- n) Memelihara Kebersihan Kantor dan rumah Jabatan Camat.
- o) Melaksanakan Urusan Pengadaan, Inventarisasi dan penghapusan Barang.
- p) Mengevaluasi pelaksanaan tugas menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan serta mencari alternatif pemecahannya.
- q) Menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan kecamatan secara sistematis kepada kantor pengelolaan aset Daerah.
- r) Menyiapkan daftar hadir PNS dan menyusun laporan Rekapitulasi daftar hadir bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- s) Menghimpun bahan dan Data untuk perumusan kebijakan terkait dengan Urusan Kepegawaian dan Diklat.
- t) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan

pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Kecamatan sesuai syarat yang ditentukan.

- u) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pembuatan Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN dan TAPERUM
- v) Menghimpun, memproses Data dan mengusulkan permohonan cuti, pemberian penghargaan, pensiun, pemberian sanksi bagi PNS.
- w) Menyusun Daftar Urut Kepengangkatan dan fasilitasi pembuatan DP3 PNS.
- x) Menyusun Daftar Penjagaan dan Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala serta KP.4 Pegawai dilingkungan Kecamatan
- y) Menghimpun dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan.
- z) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

II. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Program dan Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran dan Keuangan Tahunan sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas
- b) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

berdasarkan Skala Prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- c) Mengkolsutasikan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang bersifat urgen kepada sekretaris.
- d) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e) Menyiapkan, mengelola bahan untuk pengambilan kebijakan dan penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan.
- f) Menyusun, mengusulkan dan menganalisis data dan dokumen penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- g) Menyiapkan, mengelola bahan untuk sosialisasi petunjuk tekhnis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- h) Memeriksa, meneliti penyiapan bahan pencairan anggaran oleh Bendaharawan/Pemegang Kas.
- i) Memeriksa, meneliti pelaksanaan pembukuan keuangan oleh bendaharawan/ pemegang kas.
- j) Memeriksa,meneliti penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh bendaharawan /pemegang kas.

- k) Menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Kecamatan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran.
- l) Melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kecamatan.
- m) Menyiapkan, mengelola bahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan.
- n) Membuat Laporan Keuangan Kecamatan.
- o) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pemerintahan yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris.

- e) Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa/ Kelurahan, Pembinaan bidang Pertanahan dan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.
- g) Mempersiapkan bahan pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h) Menyusun Rencana dan Program Kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
- i) Mendata, Menghimpun dan mengelola data yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- j) Melaksanakan Administrasi Pertanahan yang menjadi urusan Kecamatan
- k) Menyiapkan Bahan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemerintahan.
- l) Melaksanakan Pembinaan serta peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- m) Menyelenggarakan Administrasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta melakukan Pelaporan
- n) Menyelenggarakan Proses Administrasi, Perijinan Bidang Pendaftaran Kependudukan dan Pertanahan yang merupakan Pelimpahan kewenangan dari Bupati

- o) Memfasilitasi, menganalisis materi Peraturan Desa dan Keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati.
- p) Menyiapkan bahan dan menyusun Monografi Kecamatan serta Pembinaan Monografi Desa/Kelurahan.
- q) Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan.
- r) Melaksanakan Pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD).
- s) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- t) Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas Wilayah antar Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan.
- u) Memfasilitasi Penyelesaian pengaduan masalah pertanahan.
- v) Memfasilitasi penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.
- w) Melaksanakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- x) Menghimpun, Menyusun Data Kependudukan dan Catatan Sipil.
- y) Melaksanakan Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan.
- z) Melaksanakan dan melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

IV. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b) Menyusun Rencana kerja dan Anggaran seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman melaksanakan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekretaris.
- e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun program kegiatan pembinaan perekonomian Masyarakat Desa/ Kelurahan, Perbankan, Perkreditan Rakyat, Perkoprasian,

Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, usaha Informal dan kehutanan serta peningkatan Produksi dan Distribusi hasil Produksi.

- g) Memfasilitasi, Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pembangunan Tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
- h) Mempersiapkan bahan urusan dalam bidang perindustrian dan Perdagangan, bidang bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, bidang Lingkungan Hidup, bidang Perkoprasian, bidang Pertambangan dan Energi, Pembinaan Lingkungan Hidup.
- i) Memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan peran serta, prakarsa dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat.
- j) Melaksanakan Pengumpulan dan pelaporan Data Kegiatan usaha Industri kecil, sumber Daya Alam dan sumber Daya manusia sektor Industri.
- k) Melaksanakan pengumpulan, Koordinasi dan Pelaporan data bidang pertanian.
- l) Melakukan koordinasi, Bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan diwilayah Kecamatan, pengembangan Kelompok Tani dan kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.

- m) Monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan pokok
- n) Mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan dan perlindungan terhadap koperasi, usaha perkebunan dan Peternakan.
- o) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.
- p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data profil Kecamatan dan Desa, data kegiatan Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
- q) Menyelenggarakan proses Administrasi Perizinan bidang Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- r) Melaksanakan Pengumpulan dan Pelaporan data Perumahan, bangunan gedung dan drainase lingkungan.
- s) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan.
- t) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan lokasi daur ulang sampah (LDUS) dan air bersih Pedesaan.
- u) Melaksanakan koordinasi dan Sosialisasi rencana tata ruang.
- v) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan Data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber

Daya Alam dan sumber daya buatan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.

- w) Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.
- x) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah.
- y) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

V. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas sebagai pedoman melaksanakan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.

- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib perijinan.
- g) Mempersiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat penertiban, Polisi Pamong Praja, Linmas Kecamatan dan Linmas Desa/ kelurahan
- h) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, potensi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- i) Menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan koordinasi dengan unit lain terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
- j) Mengatur penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban.
- k) Penegakan, pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- l) Menyiapkan bahan pembinaan dalam langkah pembauran Kesatuan Bangsa.

- m) Melaksanakan identifikasi potensi masalah ketentraman dan ketertiban serta upaya pencegahan.
- n) Memproses Administrasi, rekomendasi dan perijinan bidang politik dalam negeri dan Administrasi publik yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- o) Menginventarisasi, menyusun dan melaporkan data bidang ketentraman dan ketertiban serta Linmas.
- p) Melakukan upaya prefentip terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- q) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang.
- r) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI ketrurunan dan WNA.
- s) Mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan ummat beragama.
- t) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- u) Melakukan Pencegahan atas pengelolaan sumber daya alam tanpa izin dan

dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

- v) Melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, Zat adiktif dan bahan berbahaya.
- w) Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah.
- x) Melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.
- y) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Sebagai berikut :

- a) Memimpin, Membimbing, Meneliti dan menilai hasil Kerja Bawahan.
- b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas.
- c) Menyusun Sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Skala

Prioritas sebagai Pedoman dalam Melaksanakan Tugas.

- d) Mengkonsultasikan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekertaris.
- e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan serta bantuan sosial, Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olah Raga, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- g) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- h) Menghimpun, menyusun dan mengolah data, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial.
- i) Melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama.
- j) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemberdayaan lembaga Adat.
- k) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang ketenaga kerjaan dan pendidikan luar

sekolah, pemuda dan oleh raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati

- l) Melaksanakan koordinasi program keluarga berencana (KB).
- m) Menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- n) Menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan.
- o) Menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan bantuan bagi korban bencana serta pendistribusiannya.
- p) Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan.
- q) Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.
- r) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan keperamukaan, karang taruna, organisasi kepemudaaan dan keolahragaan.
- s) Menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan keluarga peranan wanita dan organisasi kewanitaan.

- t) Melaksanakan pendataan mengenai angkatan tenaga kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja.
- u) Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk.
- v) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah, maupun luar sekolah dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
- w) Melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit, imunisasi balita dan anak sekolah.
- x) Melaksanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi, kegiatan posyandu.
- y) Menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan krehidupan beragama.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

VII. Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

- a) Memimpin, membimbing, meneliti hasil kerja bawahan.

- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pelayanan umum yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun rencana dan pogram seksi pelayanan umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan, inventarisasi desa/ kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum.
- g) Menyusun rencana kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan perizinan.
- h) Menginventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah dilingkup kecamatan.
- i) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

- j) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
- k) Menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan Desa/ Kelurahan.
- l) Menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai bahan perencanaan dan pengembangan wilayah kecamatan.
- m) Meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perizinan serta menetapkan besaran retribusi.
- n) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- o) Menginventarisasi kantor, rumah dinas, balai desa dan bangunan milik pemerintah lainnya.
- p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
- q) Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah.
- r) Menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan.
- s) Menghimpun, mengolah data, dan membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.

- t) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan
- u) Melakukan pemantauan terhadap pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman.
- v) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan dan saluran drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air
- w) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase.
- x) Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum.
- y) Melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

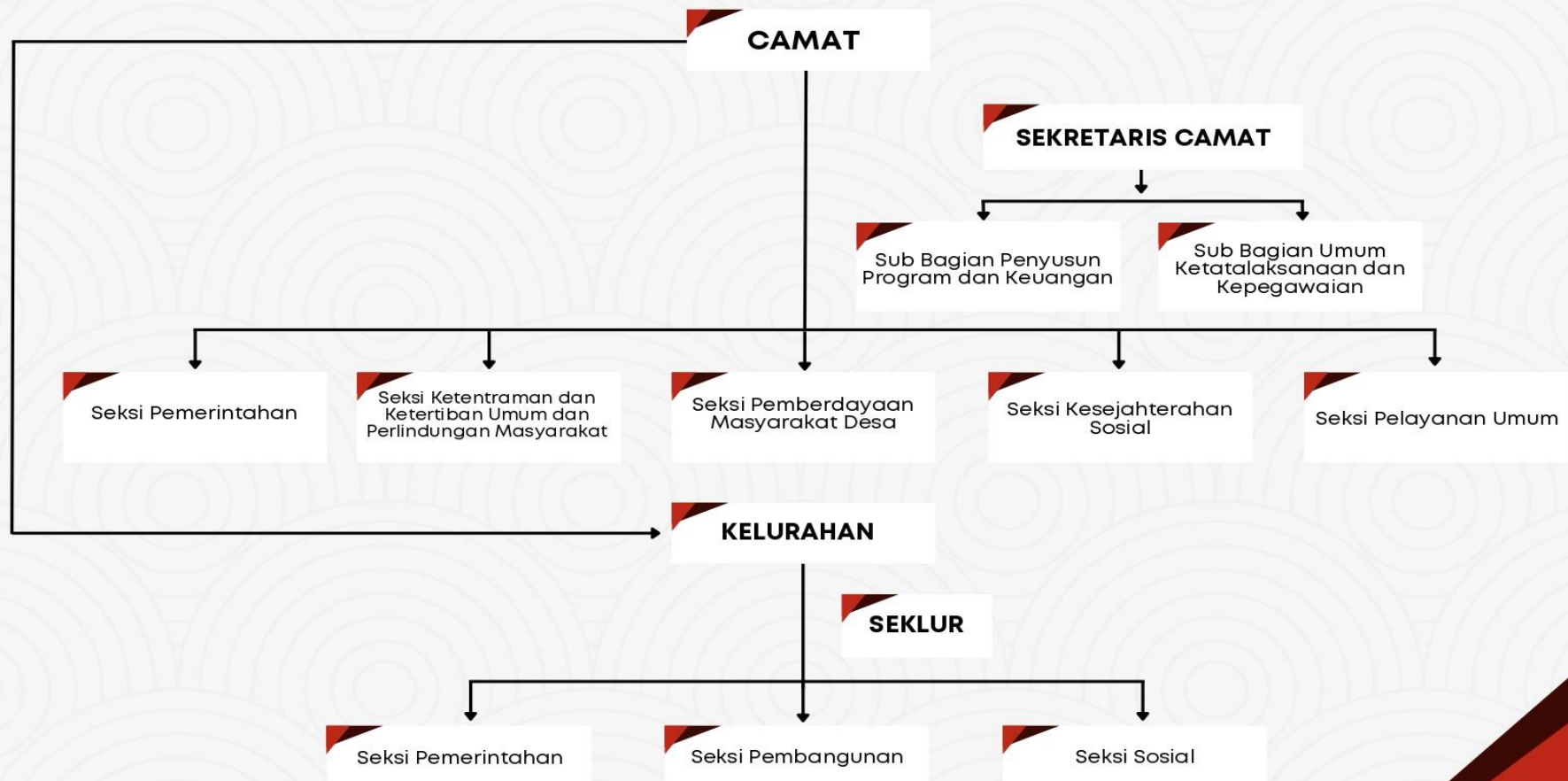
Susunan organisasi Kecamatan Samboja mengacu pada peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat Camat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Seksi Pelayanan umum.
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.
- h. Kelurahan membawahkan :
 - 1) Sekretaris.
 - 2) Seksi Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pembangunan.
 - 4) Seksi Sosial

Gambar 4
Struktur Organisasi Kecamatan Samboja



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMBOJA



2.1.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara mutlak diperlukan ketersediaan sumber daya Pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Samboja Menurut Golongan

Komposisi Pegawai secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Samboja sampai Juli Tahun 2025 setelah Pengurangan Kecamatan Samboja Barat adalah sebanyak 174 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Samboja adalah sebagaimana ditunjukkan table1 di bawah ini :

Tabel.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Samboja Menurut Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	0	0	0	0,00%
2	II	14	18	32	41,03%
3	III	23	16	39	50,00%
4	IV	7	0	7	8,97%
	Jumlah	44	34	78	100%

Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 44 pria dan 34wanita dengan dominasi pegawai di Golongan III sebanyak 39 orang.

b. Sumber Daya Manusia Kecamatan Samboja Menurut Kepangkatan

Data Pegawai Pada Kecamatan Dawarblandong Berdasarkan Kepangkatan Kepegawaian Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut

Tabel 2 Data Pegawai Kecamatan Samboja menurut Kepangkatan

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
I/a	0	0	0
I/b	0	0	0
I/c	0	0	0
I/d	0	0	0
Jumlah Gol.I	0	0	0

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
II/a	16	23	39
II/b	2	1	3
II/c	2	0	2
II/d	9	16	25
Jumlah Gol. II			0
III/a	15	20	35
III/b	5	1	6
III/c	5	1	6
III/d	12	10	22
Jumlah Gol. III			0
IV/a	6	0	6
IV/b	0	0	0
IV/c	0	0	0
IV/d	0	0	0
IV/e	0	0	0
Jumlah Gol. IV	0	0	0
TOTAL	72	72	144

Menurut kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi pangkat Pengatur Pengatur TK I sejumlah 24 orang.

c. Sumber Daya Manusia Kecamatan Samboja Menurut Tingkat Pendidikan

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan SLTA

Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Samboja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
SD / SEDERAJAT	0	0	0
SMP / SEDERAJAT	2	0	2
SMA / SEDERAJAT	25	37	62
DIPLOMA I	0	0	0
DIPLOMA II	0	0	0
DIPLOMA III	1	1	2
DIPLOMA IV	0	0	0
SARJANA (S1)	26	30	56
PROFESI	0	0	0
PASCA SARJANA (S2)	15	1	16
DOKTOR (S3)	0	0	0
SMP Kejuruan	0	0	0
SMA Kejuruan	4	2	6
SMA Keguruan	0	0	0
TOTAL	73	71	144

Menurut tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah 62 orang.

d. Sumber Daya Manusia Kecamatan Samboja yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IV. Total Pegawai yang menduduki

jabatan eselon adalah 33. Pegawai dengan jabatan eselon III berjumlah 2 orang, sementara jabatan eselon IV hanya diisi oleh 31 orang. Dan di Kecamatan Samboja Terdapat 3 Jabatan Esselon yang belum terisi sampai dengan saat ini yaitu Jabatan Kepala Seksi Kententruman dan Ketertiban Umum, Lurah dan Kasi di Kelurahan.

Tabel.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Samboja Yang Menduduki Jabatan Esselon Tahun 2025

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	1	0	1	3,03%
4	III.b	1	0	1	3,03%
5	IV.a	11	1	12	36,36%
6	IV.b	8	11	19	57,58%
Jumlah		21	12	33	100%

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain :

- Menunjang perkantoran; kegiatan ketatausahaan/administrasi
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Dengan terus berkembangnya IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Kecamatan Samboja sudah memadai namun ada beberapa sarana dan prasaran yang belum menunjang pada bidang masing-masing.

Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara :

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KONDISI	JUMLAH	KET
		TANAH			
1	1.3.5.01.001.001.012	Tanah	Baik	24	
		PERALATAN DAN MESIN			
1	1.3.2.03.001.003.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	Baik	2	
2	1.3.2.04.001.007.003	Alat Penggiling Padi	Baik	1	
3	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	Baik	209	
4	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Baik	61	
5	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Baik	55	
6	1.3.2.06.001.001.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	Baik	7	
7	1.3.2.06.002.001.022	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Baik	1	
8	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Baik	30	
9	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	Baik	1	
10	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	Baik	2	
11	1.3.2.01.001.001.009	tractor lainnya (dst)	Baik	1	
12	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	Baik	3	
13	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Baik	262	
14	1.3.2.04.001.010.001	Alat Pengolahan lainnya	Baik	1	
15	1.3.2.05.001.001.012	mesin ketik lainnya (dst)	Baik	2	
16	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Baik	1	
17	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Baik	8	
18	1.3.2.05.002.006.023	Tustel	Baik	1	
19	1.3.2.06.001.002.042	Rak Peralatan	Baik	1	
20	1.3.2.08.001.040.017	Beater Unit (Mesin Penggiling)	Baik	1	
22	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Baik	25	
23	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	Baik	1	
24	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	Baik	1	
25	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	Baik	1	
26	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	Baik	5	
27	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	95	
28	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	1	
29	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	51	
30	1.3.2.15.003.002.005	Tenda	Baik	8	
31	1.3.2.03.003.009.018	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Baik	2	
32	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	Baik	9	
33	1.3.2.05.001.002.012	Mesin Penghitung Uang	Baik	1	
34	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	Baik	11	
35	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	Baik	11	
36	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	Baik	3	
37	1.3.2.10.001.001.008	Komputer Jaringan lainnya	Baik	4	
38	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	Baik	4	
39	1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Baik	29	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KONDISI	JUMLAH	KET
40	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	Baik	3	
41	1.3.2.05.003.004.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Baik	16	
42	1.3.2.05.003.007.009	Buffet Kaca	Baik	1	
43	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	Baik	1	
44	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	Baik	4	
45	1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	Baik	1	
46	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	Baik	1	
47	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	Baik	86	
48	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Baik	13	
49	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Baik	52	
50	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	Baik	1	
51	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	9	
52	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	Baik	1	
53	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Baik	13	
54	1.3.2.02.001.004.006	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	Baik	3	
55	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	Baik	1	
56	1.3.2.05.002.001.025	Kasur/Spring Bed	Baik	8	
57	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Baik	20	
58	1.3.2.05.002.005.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Baik	1	
59	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	Baik	1	
60	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	Baik	3	
61	1.3.2.02.001.001.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Baik	7	
62	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	Baik	5	
63	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	Baik	3	
64	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	Baik	7	
65	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	Baik	2	
66	1.3.2.05.002.006.059	Gordiyin/Kray	Baik	16	
67	1.3.2.06.003.010.006	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	Baik	1	
68	1.3.2.08.001.013.081	TV Monitor	Baik	2	
69	1.3.2.02.001.006.022	Truck Sampah	Baik	1	
70	1.3.2.03.001.006.012	Gergaji Chain Saw	Baik	1	
71	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	Baik	21	
72	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	Baik	73	
73	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	Baik	1	
74	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	Baik	18	
75	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	Baik	4	
76	1.3.2.05.002.004.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Baik	5	
77	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	Baik	1	
78	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	1	
79	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	2	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KONDISI	JUMLAH	KET
80	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Baik	29	
81	1.3.2.10.002.002.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Baik	1	
82	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	Baik	5	
83	1.3.2.05.003.007.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Baik	18	
84	1.3.2.06.003.047.002	Genset	Baik	1	
85	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	Baik	3	
86	1.3.2.01.003.004.002	Portable Generating Set	Baik	1	
87	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	Baik	5	
88	1.3.2.02.001.001.004	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Baik	1	
89	1.3.2.02.001.001.004	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Baik	1	
90	1.3.2.02.001.003.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	Baik	9	
91	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	Baik	2	
92	1.3.2.05.001.003.009	Mesin Fotocopy Electronic	Baik	1	
93	1.3.2.05.001.004.020	Lemari Display	Baik	1	
94	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	Baik	3	
95	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	Baik	12	
96	1.3.2.05.001.005.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Baik	2	
97	1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air	Baik	7	
98	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	Baik	2	
99	1.3.2.05.002.006.039	Mimbar/Podium	Baik	2	
100	1.3.2.05.002.006.068	Tangga	Baik	2	
101	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	16	
102	1.3.2.05.003.006.013	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	Baik	5	
103	1.3.2.06.001.001.001	Audio Mixing Console	Baik	2	
104	1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wireless MIC	Baik	2	
105	1.3.2.06.001.002.126	Camera Digital	Baik	1	
106	1.3.2.11.001.003.001	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	Baik	1	
107	1.3.2.15.003.001.021	Tandu	Baik	2	
109	1.3.2.05.003.002.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	Baik	3	
110	1.3.2.01.001.010.018	alat pengangkat lainnya (dst)	Baik	2	
111	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Baik	2	
112	1.3.2.08.002.005.017	Smoke Detecting System & Alarm	Baik	1	
113	1.3.2.15.004.004.008	Fire Alarm System	Baik	1	
114	1.3.2.05.002.006.074	Bracket Standing Peralatan	Baik	1	
		BANGUNAN DAN GEDUNG			
1	1.3.3.01.001.009.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	3	
2	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	7	
3	1.3.3.01.001.001.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	30	
4	1.3.3.01.001.006.015	Bangunan Posyandu	Baik	1	
5	1.3.3.01.001.008.004	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	1	
6	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	2	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KONDISI	JUMLAH	KET
7	1.3.3.01.001.012.004	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	1	
8	1.3.3.01.002.008.003	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	1	
9	1.3.3.01.001.002.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	3	
10	1.3.3.02.001.004.001	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	Baik	2	
11	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	4	
12	1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	2	
13	1.3.3.01.001.011.001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Baik	1	
14	1.3.3.01.001.023.002	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen	Baik	1	
15	1.3.3.01.001.004.006	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	1	
16	1.3.3.01.001.007.004	Bangunan Oceanarium Lain-lain (dst)	Baik	1	
17	1.3.3.01.002.003.016	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	1	
18	1.3.3.01.001.013.010	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik	1	
19	1.3.3.01.001.013.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	1	
20	1.3.3.02.001.002.002	Tugu Pembangunan	Baik	1	
21	1.3.3.04.001.004.001	Pagar Permanen	Baik	5	
22	1.3.3.02.001.002.003	Tugu Peringatan Lainnya	Baik	1	
23	1.3.3.01.001.011.008	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik	1	
24	1.3.3.01.001.009.007	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	2	
25	1.3.3.01.001.032.001	Bangunan Tempat Parkir	Baik	1	
26	1.3.3.01.001.037.001	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	1	
27	1.3.3.01.001.032.005	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	4	
28	1.3.3.01.001.033.007	Bangunan Parkir lainnya (dst)	Baik	1	
29	1.3.3.01.001.033.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	3	
		JALAN JEMBATAN DAN IRIGASI			
1	1.3.4.01.001.005.002	Jalan Desa Lain-lain	Baik	372	
2	1.3.4.01.002.010.001	Jembatan Penyeberangan Orang	Baik	3	
3	1.3.4.02.001.005.003	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	Baik	65	
4	1.3.4.04.001.004.004	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	Baik	2	
5	1.3.4.04.002.001.004	Jaringan Transmisi Lain-lain	Baik	6	
6	1.3.4.02.001.006.016	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Baik	2	
7	1.3.4.02.001.006.017	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	Baik	8	
8	1.3.4.03.001.005.006	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	Baik	1	
9	1.3.4.04.003.001.004	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Baik	1	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KONDISI	JUMLAH	KET
10	1.3.4.01.002.010.006	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	Baik	6	
11	1.3.4.02.001.001.006	Bangunan Waduk a Lain-lain	Baik	1	
12	1.3.4.02.002.001.001	Waduk Pasang Surut	Baik	1	
13	1.3.4.02.002.004.005	Bangunan Saluran lain-lain	Baik	2	
14	1.3.4.04.001.001.004	Jaringan Pembawa Lain-lain	Baik	6	
15	1.3.4.01.002.009.008	Jembatan Khusus Lain-lain	Baik	4	
16	1.3.4.04.001.002.004	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	Baik	1	
17	1.3.4.04.001.003.004	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	Baik	1	
18	1.3.4.04.002.002.004	Jaringan Distribusi Lain-lain	Baik	2	
19	1.3.4.02.006.006.001	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Baik	1	
20	1.3.4.01.001.005.001	Jalan Desa	Baik	175	
21	1.3.4.01.002.005.001	Jembatan Pada Jalan Desa	Baik	28	
22	1.3.4.01.002.005.002	Jembatan Desa Lain-lain	Baik	82	
23	1.3.4.02.007.003.004	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	Baik	10	
24	1.3.4.02.006.001.003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Baik	1	
25	1.3.4.02.006.002.008	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	Baik	3	
26	1.3.4.02.006.003.003	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Baik	1	
27	1.3.4.02.007.001.005	Bangunan Pembawa Air KOtor Lain-lain	Baik	43	
28	1.3.4.03.002.001.004	Instalasi Air Kotor Lain-lain	Baik	5	
29	1.3.4.03.002.003.004	Instalasi Air Buangan Pertanian Lain-lain	Baik	14	
30	1.3.4.03.004.002.007	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lain-lain	Baik	1	
31	1.3.4.02.007.004.005	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	Baik	85	
32	1.3.4.02.005.002.001	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Baik	1	
33	1.3.4.02.004.004.003	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	Baik	1	
34	1.3.4.02.007.005.006	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	Baik	8	
35	1.3.4.02.001.003.008	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	Baik	1	
36	1.3.4.02.004.005.007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Baik	1	
37	1.3.4.02.005.005.005	Bangunan Pengaman Pengembangan Lain-lain	Baik	1	
38	1.3.4.02.007.001.001	Saluran Pengumpul Air Hujan	Baik	4	
39	1.3.4.02.002.005.001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pasang Surut)	Baik	1	
40	1.3.4.02.004.004.002	Saluran Drainage	Baik	29	
41	1.3.4.02.007.003.005	Bangunan Pembuang Air Kotor Lain-lain (dst)	Baik	39	
42	1.3.4.02.007.006.001	Bangunan air kotor lainnya	Baik	45	
43	1.3.4.01.002.013.001	Jembatan lainnya	Baik	1	
44	1.3.4.02.001.004.004	bangunan pembuang irigasi lainnya (dst)	Baik	6	
45	1.3.4.02.001.008.001	Bangunan air irigasi lainnya	Baik	7	
46	1.3.4.02.004.005.012	Bangunan Pemecah Gelombang	Baik	1	

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KONDISI	JUMLAH	KET
		ASET TETAP LAINNYA			
1	1.3.5.01.001.001.012	Buku Umum Lain-lain	Baik	1	
2	1.3.5.02.001.001.003	Alat Kesenian Lain-lain	Baik	1	
3	1.3.5.05.001.001.001	Tanaman Keras	Baik	3	
4	1.3.5.07.001.001.007	Aset Renovasi	Baik	5	

2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SAMBOJA

Kecamatan Samboja menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada Masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa, Kelurahan karena keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Samboja berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja Pelayanan SKPD tahun 2024 yaitu Sangat Baik yaitu sebesar 89,45 dan atau indikator lainnya disajikan dalam tabel T-C.23 dibawah ini :

TC 23
PENCAPAIAN PELAYANAN KECAMATAN SAMBOJA

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Tahun ke					Rasio Capaian Pada tahun ke				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti				81	80	83	83	83	n.a	80	92,12	100			100	110,98	120,48	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum				70	75	75	75	80	n.a	75	75,00	100			100	100	133,33	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa				75	75	75	75	75	n.a	49	82,61	83,61			65,33	110,14	111,48	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan				100	0	0	0	0	n.a	0	0	0		0	0	0	0	0

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di Kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- merupakan hasil kerjasama Tim seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel T. C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAMBOJA

uraian	anggaran pada tahun ke						realisasi pada tahun ke				Rasio Capaian Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
belanja tidak langsung	3,275,858,143.13	3,829,915,425.00	3,928,903,943.38	4,189,471,648.45	21,107,056,660.60	2,926,033,544	3,276,362,257	3,586,351,973	3,615,081,905	19,597,886,733	89.32	85.55	91.28	86.29	92.85	36,331,205,820.56	33,001,716,412
belanja langsung	19,363,902,740.00	4,463,209,200.00	8,118,315,450.00	14,874,006,700.00	31,499,734,060.19	19,037,866,700	4,411,538,110	7,935,528,550	11,878,947,944	19,415,717,854	98.32	98.84	97.75	79.86	61.64	78,319,168,150.19	62,679,599,158
jumlah	22,639,760,883.13	8,293,124,625.00	12,047,219,393.38	19,063,478,348.45	52,606,790,720.79	21,963,900,244	7,687,900,367	11,521,880,523	15,494,029,849	39,013,604,587	187.64	184.39	189.03	166.15	154.49	114,650,373,970.75	95,681,315,570

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE						REALISASI PADA TAHUN KE				Rasio Capaian Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,189,471,648.45	21,107,056,660.60	17,881,751,049.55	18,257,368,661.55	19,092,455,366.31	3,615,081,905	19,597,886,733	17,457,987,922	17,876,049,180	18,636,835,301	86.29	92.85	97.63	97.93	97.61	80,528,103,386.46	77,183,841,041
BELANJA LANGSUNG	14,874,006,700.00	31,499,734,060.19	42,101,582,682.00	52,464,892,457.00	87,712,703,340.56	11,878,947,944	19,415,717,854	41,096,583,618	49,353,224,183	67,009,795,716	79.86	61.64	98.34	94.15	76.56	228,652,919,239.75	188,754,269,315
JUMLAH	19,063,478,348.45	52,606,790,720.79	59,983,333,731.55	70,722,261,118.55	106,805,158,706.87	15,494,029,849	39,013,604,587	58,554,571,540	67,229,273,363	85,646,631,017	166.15	154.49	195.97	192.08	174.17	309,181,022,626.21	265,938,110,356

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Belanja Tidak Langsung	2.374.790.595	-	-	-	-	2.068.112.485	-				87,08					2.068.112.485,00	87,08
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	16.672.696.105					27.190.741.126					163,08					27.190.741.126,00	163,08
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.172.800.000					5.426.988.447					104,91					5.426.988.447,00	104,91
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.388.404.008					12.727.435.552					135,56					12.727.435.552,00	135,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.919.962.378	28.202.859.302	28.202.859.302	28.202.859.302	28.202.859.302	39.707.228.488	27.366.123.806	34.594.937.688	16.851.591.568,00	-	159,33	97,03	122,66	59,75	-	29.629.970.388	109,69
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.000.000	17.695.000.000	17.695.000.000	17.695.000.000	17.695.000.000	3.502.097.156	50.496.155.822	114.469.302.179	98.401.963.661,00	-	4.377,62	285,37	646,90	556,10	-	66.717.379.705	1466,50
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.962.906.342	38.418.229.000	38.418.229.000	38.418.229.000	38.418.229.000	9.329.750.750	37.503.192.436	42.970.487.821	24.230.474.634,00	-	93,64	97,62	111,85	63,07	-	28.508.476.410	91,54
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	141.430.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.430.000	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	418.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.250.000	-
JUMLAH	68.571.559.428	84.316.088.302	84.331.088.302	84.316.088.302	84.875.768.302	99.952.354.004	115.365.472.064	192.034.727.688	139.484.029.863	-	5.121,22	480,02	881,42	678,92	-	172.843.784.112	2.158

Tabel di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada tiga program utama Kecamatan Samboja dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik diatas 100%, bahkan mencapai 646,90% pada 2023, karena dari Tahun 2023 ke bawah Kecamatan Samboja masih membawahi 19 Kelurahan dan 4 Desa . Sedangkan di tahun 2024 Kecamatan Samboja sudah Pemekaran menjadi 2 yaitu Kecamatan Samboja dan Samboja Barat, dan di tahun 2024 Pagu anggaran Kecamatan Samboja di bagi untuk 2 Kecamatan, sehingga dari Tahun 2024 Anggaran pada setiap Program terjadi penurunan.

Secara keseluruhan, Kecamatan Samboja menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat penurunan alokasi pada beberapa program karena adanya Pemekaran Wilayah dan penyesuaian anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2021 s/d 2026 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Samboja sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kerjasama tim pengelola anggaran yang memadai baik Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Samboja.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran di beberapa Sub Kegiatan dan tidak bisa 100% seperti seperti penyediaan jasa komunikasi dan Listrik, Belanja Gaji dan Tunjangan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.

KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Samboja yaitu Masyarakat di wilayah kecamatan Samboja sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti :

- Penduduk kecamatan : Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
- Perangkat daerah : Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan/ Desa
- Organisasi kemasyarakatan : Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain.
- Dunia usaha : Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
- Kelompok rentan : Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
- Pihak lain yang membutuhkan pelayanan : Institusi pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.

Masyarakat Kecamatan Samboja sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Samboja adalah “Meningkatnya layanan administrasi Kecamatan” Pelayanan dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Samboja yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5 TANTANGAN DAN PELUANG PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN

2.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN

Adapun Sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Samboja adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dimana sebelum melakukan analisis kita perlu mengidentifikasi beberapa faktor Internal dan Eksternal yaitu sebagai berikut :

Situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan Kantor Camat Samboja memiliki keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi, antara lain :

1. Adanya Sumber Daya Alam.
2. Adanya Sumber Daya Manusia.
3. Kompetensi Kelembagaan/Struktur Organisasi yang cukup kuat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samboja yang sangat berkaitan dengan tugas umum Pemerintah dibagi

menjadi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan yang terdapat dalam tabel halaman berikut:

Tabel C
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Penyebab/Akar Masalah
Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan Bupati kepada Camat	Kurangnya pemahaman berkaitan dengan peraturan daerah atau kebijakan yang spesifik untuk memperkuat peran kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan.	Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan terkait interpretasi peraturan yang berlaku.
	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sehingga menghambat efektivitas implementasi program.	Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.
		Kurangnya forum koordinasi lintas tingkat pemerintahan.
	Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.	Lemahnya komunikasi antar sektor atau OPD terkait.
		Lemahnya komunikasi untuk menyelaraskan peraturan lintas sektor sebelum diimplementasikan.
	Kurangnya pedoman teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan.	Kurangnya pemahaman terhadap dokumen acuan atau panduan teknis yang disediakan untuk kecamatan.

Pokok Masalah	Masalah	Penyebab/Akar Masalah
		Pelimpahan kewenangan yang dilakukan tanpa evaluasi mendalam terhadap kapasitas kecamatan.
Belum adanya roadmap berkaitan dengan peningkatan kapasitas atau formasi kebutuhan tenaga personel yang ada di Kecamatan	Ketidakmerataan distribusi SDM antar kecamatan, terutama di daerah terpencil.	Belum maksimalnya Pemetaan identifikasi kebutuhan formasi SDM
	Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus di bidang administrasi desa atau kelurahan.	Rendahnya program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi SDM kecamatan. Proses rekrutmen yang tidak memperhatikan kebutuhan tenaga dengan kompetensi khusus.
Kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan di tingkat Kecamatan	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi kecamatan dalam melayani kebutuhan mereka.	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan Kecamatan Minimnya sosialisasi tentang peran dan fungsi kecamatan.
	Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang tidak merata, terutama di desa-desa terpencil.	Kendala geografis yang menyulitkan akses ke desa terpencil.
	Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern.	Belum optimalnya program pelatihan berkala yang terencana.

Pokok Masalah	Masalah	Penyebab/Akar Masalah
	Minimnya promosi tentang program inovasi pelayanan publik kepada masyarakat.	Tidak adanya strategi komunikasi yang terfokus pada promosi inovasi pelayanan.
		Penggunaan media informasi yang kurang optimal.
	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan layanan.	Tidak adanya panduan yang jelas dan mudah diakses untuk pengaduan layanan.
		Sosialisasi mekanisme pengaduan yang tidak intensif.
Kurangnya Sinergitas Program/Kegiatan/Aktivitas konektivitas antar wilayah	Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau desa tertentu, terutama di wilayah terpencil.	Infrastruktur jalan yang belum memadai di wilayah terpencil.
	Tidak meratanya penyediaan transportasi umum yang memadai untuk menuju kecamatan.	Belum adanya kebijakan yang mendukung pengembangan transportasi umum di daerah terpencil.
	Kendala geografis wilayah seperti pegunungan atau sungai yang menghambat distribusi layanan.	Lokasi geografis yang sulit dijangkau tanpa infrastruktur pendukung seperti jembatan atau jalan layak.
		Kurangnya inovasi dalam solusi transportasi.
	Keterbatasan jam operasional pelayanan publik yang tidak fleksibel bagi masyarakat pekerja.	Tidak adanya kebijakan yang menyesuaikan jam pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

Pokok Masalah	Masalah	Penyebab/Akar Masalah
		Keterbatasan jumlah SDM untuk memperpanjang jam layanan.
	Kurangnya fasilitas ramah disabilitas di kantor kecamatan.	Tidak adanya regulasi wajib tentang fasilitas ramah disabilitas pada kantor pelayanan publik.
Belum adanya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital	Minimnya infrastruktur digital di kecamatan, seperti jaringan internet yang stabil.	Keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil.
	Sistem informasi manajemen pemerintahan (SIM) yang belum terintegrasi antar kecamatan dan kabupaten.	Tidak adanya kebijakan atau standar teknis untuk integrasi sistem informasi.
	Rendahnya kemampuan perangkat kecamatan dalam mengoperasikan aplikasi berbasis digital.	Kurangnya pelatihan khusus bagi SDM kecamatan terkait pengoperasian teknologi digital.
		Rendahnya prioritas pengembangan kompetensi digital.
	Kurangnya data yang akurat dan terupdate untuk mendukung perencanaan kecamatan.	Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Pokok Masalah	Masalah	Penyebab/Akar Masalah
	Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pelayanan publik, seperti pelayanan administrasi online.	Rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat karena minimnya sosialisasi.
Rendahnya kapasitas aparat pemerintah Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan	Tidak jelasnya pembagian tugas dan fungsi antara camat, perangkat kecamatan, dan kelurahan.	Tidak adanya pedoman kerja yang rinci dan terperinci terkait tugas dan fungsi.
		Kurangnya komunikasi internal yang efektif dalam mendistribusikan tugas.
	Ketidaksesuaian antara pelimpahan kewenangan dengan kapasitas kecamatan untuk menjalankan tugas tersebut.	Kurangnya analisis kapasitas SDM dan sarana prasarana sebelum pelimpahan kewenangan.
		Tidak adanya pelatihan pendukung sebelum pelimpahan tugas.
	Kurangnya evaluasi kinerja camat dan perangkat kecamatan secara periodik.	Tidak adanya mekanisme evaluasi yang baku dan terjadwal.
		Rendahnya pengawasan dari tingkat kabupaten terhadap kinerja kecamatan.
	Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.	Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah terkait.
		Tidak adanya forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral.

Pokok Masalah	Masalah	Penyebab/Akar Masalah
	Beban kerja camat yang terlalu tinggi karena harus menangani terlalu banyak aspek teknis.	Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis. Tidak adanya pembagian prioritas tugas yang jelas antara aspek teknis dan administratif.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Samboja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, khususnya untuk sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan.
2. Integrasi kebijakan pemerintah kecamatan dengan program prioritas IKN Nusantara untuk memanfaatkan peluang pembangunan wilayah.
3. Penyusunan kebijakan adaptasi perubahan iklim, terutama untuk mitigasi dampak di kawasan pesisir dan ekosistem laut.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis e-Government untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
5. Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
6. Peningkatan kebijakan sosial untuk mendukung pemberdayaan perempuan, anak, dan kelompok rentan.

7. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data
8. Penyelarasan kebijakan kecamatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara 2019–2039.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pemerintahan Kecamatan Samboja adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok.
2. Belum optimalnya sistem pelaporan kecamatan dan kelurahan secara rutin/berkala.
3. Lemahnya pengawasan internal pemerintah/belum optimalnya SPIP
4. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi berbasis elektronik, baik dalam mendukung kinerja pelayanan publik maupun operasional SKPD.
5. Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena kurangnya fasilitas yang tersedia
6. Masih tingginya angka pengangguran akibat banyaknya Pekerja yang habis kontrak dengan Pihak Perusahaan dan Perusahaan belum memprioritaskan penduduk setempat sebagai pekerja.
7. Keterbatasan akses transportasi untuk menjangkau wilayah terpencil di kecamatan.
8. Ketidalcukupan anggaran operasional untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah, sehingga menimbulkan resistensi pada beberapa program.

10. Perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah kelurahan/desa, yang menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi.
11. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah, yang menghambat implementasi digitalisasi..

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD yang memiliki tugas pokok menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Samboja, antara lain :

Faktor Internal

1. Kelebihan:

- Kepemimpinan yang solid di tingkat kecamatan.
- Ketersediaan pegawai dengan tingkat pendidikan yang memadai di beberapa unit kerja.
- Struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas baru.
- Komitmen pemerintah kecamatan untuk meningkatkan pelayanan publik.

1. Kekurangan:

- Ketidakseimbangan jumlah SDM antar bidang kerja.
- Tingkat rotasi pegawai yang tinggi, yang mengurangi kesinambungan program.

- Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus di bidang teknologi informasi.
- Pengelolaan aset daerah yang belum optimal.
- Kurangnya program pengembangan pegawai, seperti pelatihan dan pendidikan lanjut.

Faktor Eksternal :

Faktor Eksternal:

1. Peluang:

- Peran strategis sebagai wilayah penyangga IKN Nusantara.
- Dukungan dari pemerintah pusat dan kabupaten dalam bentuk kebijakan dan anggaran tambahan.
- Potensi investasi dari sektor swasta yang tertarik dengan pembangunan IKN.
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan.
- Akses ke teknologi baru yang mendukung pelayanan publik.

2. Ancaman:

- Eksploitasi sumber daya alam yang dapat memicu kerusakan lingkungan.
- Perubahan kebijakan nasional yang tidak sejalan dengan rencana daerah.
- Persaingan dengan wilayah lain untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan.
- Ancaman bencana alam, seperti banjir dan abrasi di wilayah pesisir.

- Kesenjangan ekonomi yang memicu konflik sosial di masyarakat.

2.1.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Samboja dalam kurun waktu 2025 – 2029, adalah sebagai berikut

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kecamatan Samboja memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, perkebunan, dan perikanan. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan pesisir dan sungai. Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah kecamatan perlu melakukan rehabilitasi lahan kritis

dan mendorong pengelolaan limbah secara terpadu. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga harus ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha. Selain itu, kecamatan dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan IKN Nusantara untuk implementasi teknologi ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah industri yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

2. Integrasi dengan Pembangunan IKN Nusantara.

Dekatnya Kecamatan Samboja dengan IKN Nusantara membuka peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan baru, Kecamatan Samboja diproyeksikan akan mengalami perkembangan pesat, baik dari segi infrastruktur maupun migrasi penduduk. Namun, peluang ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait tekanan terhadap lahan produktif, potensi konflik tata ruang, dan dampak sosial-ekonomi dari proses urbanisasi yang cepat.

Pemerintah Kecamatan Samboja harus segera menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kebijakan pembangunan IKN Nusantara untuk menghindari konflik penggunaan lahan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk pihak pemerintah pusat dan IKN, akan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan harmonis. Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari IKN dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari migrasi penduduk yang dipicu oleh pembangunan IKN,

seperti peningkatan kebutuhan akan perumahan, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan.

3. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur

Meskipun Kecamatan Samboja memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor kecamatan dan kelurahan, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Samboja dapat menjadi kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang menjadi sesuatu hal yang strategis dan menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset lebih diarahkan kepada (*entrepreneurial management*) yang pada intinya

pengelolaan berbasis kinerja (*Performance Basic*), bukan pada basis kebijakan (*Policy Basic*).

Sistem keuangan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan SAMBOJA. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan.

Internal pemerintah (SPIP) atau Pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik.

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan dan pelaporan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah antara lain adalah :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai aset daerah, menyangkut aset tanah, bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan.
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah.
- 3) Pengamanan barang daerah.
- 4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

5. Digitalisasi Administrasi dan Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Samboja masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan, pengelolaan data penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

- **Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Wilayah**

Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Samboja, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor-sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah kecamatan perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke

pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat Samboja dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikananannya

- **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum**

Keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Samboja seringkali terancam oleh konflik sosial, pencurian, dan meningkatnya jumlah penduduk akibat migrasi dari daerah lain. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengamanan di wilayah tersebut. Pemerintah kecamatan perlu memperkuat koordinasi dengan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Selain itu, program peningkatan kapasitas linmas dan pengawasan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan di tingkat desa dan kelurahan.

- **Penguatan Mitigasi dan Penanganan Bencana**

Kecamatan Samboja rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, abrasi, dan kebakaran hutan. Kurangnya kesiapan masyarakat dan keterbatasan peralatan tanggap darurat menjadi kendala utama dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah kecamatan perlu mengembangkan sistem mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan tanggap bencana dan pembentukan relawan bencana di tingkat desa. Pengadaan alat mitigasi bencana, seperti pompa air, tanggul, dan peralatan pemadam kebakaran, juga sangat penting untuk

meminimalisir dampak bencana. Pembangunan infrastruktur pelindung, termasuk saluran drainase yang baik, akan membantu mengurangi risiko banjir dan abrasi yang sering terjadi di wilayah ini.

1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan yang berfokus terhadap pusat pangan, pariwisata, industri hijau, sejahtera dan berkelanjutan sebagaimana Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045. Dengan penyelenggaraan penataan ruang yang terencana, setiap sektor dapat berkembang secara sinergis, saling mendukung, dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.

Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045 :

“Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045 :

Untuk mencapai visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045, telah dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing;

Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

- Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien;
- Misi 4 : Mewujudkan demokrasi substantial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh;
- Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal;
- Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif;
- Misi 7 : Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau; dan
- Misi 8 : Mewujudkan sinergisitas dan kesinambungan pembangunan.

Keterhubungan Terhadap Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045:

- Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Dengan Membangun Penyelenggaraan Pemerintahan yang Cerdas, Adaptif, dan Efisien.

Misi ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola yang bermakna sebuah perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang dapat secara efektif dan efisien dilakukan. Digitalisasi harus dilakukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hal ini yang dimaknai sebagai kata Cerdas dalam misi ini. Transformasi tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien mendukung peningkatan pelayanan publik Kecamatan dengan cara mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses pelayanan bagi masyarakat. Dengan tata kelola pemerintahan yang cerdas,

pelayanan Kecamatan dapat didukung oleh teknologi digital, seperti sistem informasi geografis (GIS), aplikasi online, dan platform berbasis data real-time. Hal ini memungkinkan proses administrasi, seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melalui tata kelola yang efisien, pelayanan Kecamatan dapat meminimalkan birokrasi berlapis, mengurangi waktu proses, dan memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mendukung perencanaan dan program kerja yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masa depan.

- Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata Dengan Membangun Konektivitas dan Integrasi Regional untuk Pertumbuhan yang Inklusif

Misi ini dilakukan untuk segala aktivitas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan karakter regional dan setiap wilayah harus diperlakukan dengan konsep tertentu sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif dapat diupayakan dengan melakukan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya, pembangunan konektivitas dan integrasi regional melalui pemanfaatan tanah asset Pemerintah, dan pengembangan wilayah yang terencana melalui penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan pembangunan wilayah secara seimbang dan berkelanjutan agar dapat terintegrasi dan memiliki konektivitas yang terbangun guna

mendukung penyebaran manfaat pembangunan secara inklusif. Dengan mengintegrasikan aspek pemerataan penguasaan sumber daya dan pembangunan konektivitas setiap wilayah dapat berkembang secara optimal, terhubung, dan berkontribusi pada pembangunan kewilayahan yang merata.

- Misi 8: Mewujudkan Sinergisitas dan Kestinambungan Pembangunan

Misi ini merupakan prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yang harus diwujudkan dalam segala upaya transformasi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai elemen harus dapat bersinergi, bukan hanya peran pemerintah semata dalam mewujudkan agenda pembangunan.

Mewujudkan sinergitas dan kestinambungan pembangunan di tingkat kecamatan adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ini melibatkan koordinasi yang erat antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga desa, dan masyarakat.

Sinergitas dalam pembangunan kecamatan mengacu pada kerja sama yang harmonis antara berbagai elemen yang terlibat dalam proses pembangunan. Kestinambungan pembangunan menekankan pada bagaimana pembangunan yang dilakukan saat ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dan tidak merusak potensi pembangunan di masa depan.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan dimulai dengan merumuskan Visi, Misi, dan nilai nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi,

memiliki orientasi ke depan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif.

Adapun Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

” Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sedangkan *Misi* yang diemban untuk mencapai Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih diatas selanjutnya dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah :

Gambar 5.
17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

17 PROGRAM DEDIKASI

Misi#1.

Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;

Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia;

Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa

Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pasantren Idaman Terbaik

Program Etam Sejahtera

Misi#2.

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif

Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera

Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh

Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.

Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.

Program Stimulus Komunitas Kreatif

Misi#3.

Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Program Pelayanan Publik Cerdas

Program ASN Kukar Terbaik

Misi#4.

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Program RT Ku-Terbaik

Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.

Program Jaga Lingkungan Lestari

Misi#5.

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.

Program Internet Desa Gratis.

Program Permukiman Idaman Terbaik.

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia.

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, berupa pemberian makanan pokok bergizi pada balita atau kategori PAUD sebagai Upaya mengeliminasi angka gizi buruk dan gizi kurang khususnya pada keluarga prasejahtera, serta pengurangan resiko angka prevalensi stunting, selanjutnya memberikan bantuan makanan sehat bagi lansia melalui penguatan posyandu, dengan pola pelaksanaan yang sinergi, tertib, dan berbasis data, serta ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian yang berkala

b. Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, dengan meringankan beban biaya perlengkapan sekolah dan biaya transportasi pada murid PAUD-SD SMP, dengan penyediaan baju seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi murid setiap tahunnya, salah satunya melalui peningkatan BOSKAB pada masing-masing sekolah, khusus untuk fasilitasi transportasi sekolah disediakan sarana dan prasarana antar jemput sekolah, dengan unit transportasi menyesuaikan karakteristik wilayah Kutai Kartanegara dengan standard keamanan yang layak. Selain daripada itu untuk menurunkan resiko putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan di wilayah terpencil, dikembangkan sekolah menengah pertama (SMP) berasrama (boarding school) bersubsidi dan berbasis pilot project pada lokasi yang dapat menjadi simpul dalam satu wilayah kecamatan.

Untuk memastikan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan mendorong pencapaian prioritas daerah, maka tetap dilanjutkan program beasiswa/ stimulant kepada siswa/siswi Kutai Kartanegara, dengan sasaran prioritas:

- a. Penyiapan Siswa Sekolah Kedinasan,
- b. Masyarakat Prasejahtera, dan
- c. Siswa/Siswi. Berprestasi pada jenjang SD SMP, SMU/ Sederajat,

Beasiswa tuntas bagi mahasiswa Kutai Kartanegara khususnya menunjang penyediaan tenaga layanan dasar dan penyediaan tenaga teknis yang sejalan dengan prioritas daerah, diantaranya adalah: Tenaga Pendidik, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Teknik Industri, Seni, Sastra dan Budaya, serta Teknologi Informasi dengan target minimal 1.000 Orang Mahasiswa, yang dikelola secara professional

bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi minimal Baik Sekali.

Selain daripada itu dikhususkan pula beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat tergolong pra sejahtera dalam kerangka kebijakan “Satu KK Satu Sarjana”

c. Program Bantuan Sekolah Swasta/ Pondok Pasantren Idaman Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat sekolah swasta sebagai bagian dari satuan pendidikan di Kutai Kartanegara, dengan memberikan program bantuan berbasis sekolah swasta/pondok pasantren bagi peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru swasta, sarana dan prasarana Sekolah.

d. Program Etam Sejahtera

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat prasejahtera, dengan memberikan bantuan pangan bagi kelompok kategori jompo, disabilitas dan anak terlantar kategori miskin. Memastikan jaminan kesehatan terpenuhi 100%, jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan termasuk relawan kebencanaan/kemanusiaan, dan perbaikan rumah tidak layak huni minimal 500 unit per tahun, serta memfasilitasi kelompok disabilitas agar mendapat akses pada lapangan kerja formal dan informal melalui penguatan dan integrasi program kukar siap kerja dan klinik wirausaha pemuda mandiri, dengan membuka unit layanan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja hingga di setiap kecamatan. Khusus untuk peningkatan layanan kesehatan dikembangkan jaminan kesehatan, dengan pola Berobat Gratis cukup dengan KTP.

e. Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pembangunan kawasan-kawasan strategis/khusus untuk mempersiapkan simpul kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien, berbasis pada sumber daya ekonomi terbarukan, dengan membangun pola hubungan industri hulu dan hilir yang produktif, dalam satu kesatuan wilayah ekonomi potensial, dengan tujuan menciptakan suatu ekosistem perekonomian wilayah yang menjangkau seluruh potensi daerah secara terintegrasi dan terstruktur dalam bingkai rantai nilai yang saling terkait, dengan melakukan serangkain kegiatan, mulai dari penyiapan lahan, SDM, sarana dan prasarana, jaringan logistik, tata kelola pengairan, hingga kelembagaan yang disusun dalam satu kesatuan dokumen perencanaan yang dilaksanakan secara fokus, gradual dan berkesinambungan. Adapun target pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera (KES), tersebut berada pada 3 zonasi tematik RPJPD, yakni :

- a. KES I : Pengembangan Perkotaan (Pusat Perdagangan dan Jasa)
- b. KES II : Industri Hijau 3)
- c. KES III : Pusat Pangan dan Pariwisata.

f. Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan dan menyediakan generasi petani/peternak/nelayan tangguh yang dilaksanakan dengan metode pelatihan, pendampingan, magang dan yang diiringi dengan fasilitasi sarana dan prasarana petani/nelayan. Program ini untuk mendorong tumbuhnya petani/nelayan

milennial yang memiliki keterampilan/keahlian pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan modern dengan metode sekolah dilaksanakan di dalam/luar wilayah Kutai Kartanegara. Selain untuk pengembangan sumber daya manusia, maka perlu didukung pula dengan penguatan kapasitas produksi di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan penyediaan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang layak dan modern pada sektor perikanan dan pertanian, melalui program bantuan untuk 100 Ribu Petani, Nelayan, dan Peternak Produktif. Dan dalam rangka menjaga kelangsungan nelayan agar mudah mengakses BBM, dilakukan fasilitasi pembangunan SPBN di wilayah potensi perikanan tangkap.

g. Program Kredit Kukar Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Peternak dan Nelayan, untuk mengakses bantuan permodalan yang bersumber dari bank, dengan pengurusan yang mudah, cepat dan tanpa bunga, dengan rentang nilai kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Serta memperkuat permodalan pada Koperasi dan BUMDesa dengan alokasi sebesar 1 Milyar Rupiah, salah satunya dalam rangka menyediakan pupuk bersubsidi yang dijalankan secara selektif dan berdampak bagi geliat perekonomian di desa/kelurahan.

h. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya Kukar, dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada sanggar seni dan budaya, baik berupa sarana dan prasarana, fasilitasi legalitas kelembagaan, promosi pertunjukan, serta peningkatan kapasitas SDM yang

dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan daya tarik destinasi wisata daerah. Dengan kegiatan utama adalah pembangunan pusat seni dan budaya daerah di setiap kecamatan, re-visioning Pulau Kumala sebagai kawasan wisata kuliner, seni dan budaya nusantara yang modern sebagai bagian dari Pembangunan Tenggarong sebagai pusat sejarah dan budaya.

i. Program Stimulus Komunitas Kreatif

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada seluruh insan kreatif di Kutai Kartanegara, dengan membangun ekosistem ekonomi kreatif yang produktif, dengan memberikan stimulus dalam membangun kolaborasi komunitas ekraf minimal bantuan stimulus sebesar 100 juta rupiah bagi komunitas ekraf yang diikuti dengan mengoptimalkan Fasilitas Gedung Ekonomi Kreatif secara gratis sebagai sharing pengetahuan, peningkatan keterampilan, fasilitasi HAKI, dan wadah membangun jaringan kemitraan dan pertunjukan yang diselenggarakan secara kolaboratif. Minimal 2 kali setahun rutin menyelenggarakan kontes karya kreatif yang bertaraf nasional, dan 1 Event 1 Kecamatan yang bertaraf Nasional.

j. Program Pelayanan Publik Cerdas

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip smart and good governance hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan

publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

k. Program ASN Kukar Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk menjalankan prinsip-prinsip ASN BerAKHLAK secara optimal, dengan fokus pada perbaikan kapasitas SDM Aparatur, melalui implementasi merit system pada jenjang karir yang disertai dengan peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai dan melakukan perbaikan tata kelola Tenaga Honor Lokal salah satunya penyesuaian terhadap UMK yang berkeadilan bersandar pada perhitungan beban kerja yang realistis dan faktual. Selain daripada itu diperkuat dengan peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dengan kegiatan utama beasiswa tugas belajar kepada ASN potensial mulai jenjang S1, S2 dan S3. Disisi lain dalam upaya meningkatkan keahlian ASN, diperkuat dengan Optimalisasi Pelayanan Diklat Kepegawaian, tahap awal didukung dengan skema kerjasama dengan lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi.

1. Program RT Ku-Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan,

prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

m. Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk penghargaan kepada guru mengaji kitab suci (seluruh agama) terdaftar pada lembaga pendidikan keagamaan, serta imam, khotib dan marbot masjid/mushola/rumah ibadah lainnya yang terdaftar, dengan memberikan insentif bulanan yang dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya untuk memberikan apresiasi kepada

pemuka dan pelaku keagamaan disiapkan Umroh Gratis, dan khusus bagi kegiatan-kegiatan pengajian melalui lembaga majelis ta'lim dan shalawat di berikan bantuan 25 juta rupiah untuk penunjang aktivitas rutin yang lebih bernilai. Seluruh kebijakan tersebut diintegrasikan dengan Program RT Ku-Terbaik.

n. Program Jaga Lingkungan Lestari

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui peningkatan pengawasan pada seluruh perusahaan yang beraktifitas di wilayah Kutai Kartanegara untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup, dengan mewajibkan kepada seluruh perusahaan untuk mengalokasikan Program Kelestarian Lingkungan Hidup di sekitar daerah operasi. Selanjutnya melanjutkan program Kukar Peduli Lingkungan dengan menyediakan pengelolaan persampahan yang baik, dengan memperluas pembangunan unit TPS-3R (reduce, reuse, recycle) modern dengan standard kelayakan yang tinggi minimal satu Unit per-kecamatan, serta melanjutkan Program Desa Ramah Lingkungan, dengan target seluruh desa di wilayah Kutai Kartanegara.

o. Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan desa, untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis potensi desa, dengan mendorong kerjasama antar Pemerintah Desa dalam kerangka pembangunan wilayah perdesaan yang di desain secara fokus dan tematik. Adapun kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dan pembinaan

terhadap pemerintah desa, melakukan dukungan kebijakan melalui penguatan fiskal pemerintah desa melalui BKKD, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, serta promosi dan pemasaran hasil produk BUMDes. Dengan Mengalokasikan anggaran dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar 100 Milyar Per Tahun. Kondisi ini ditopang pula dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

p. Program Internet Desa Gratis

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memastikan Kukar tanpa blank spot dengan menyediakan internet desa secara mudah dan gratis, dengan mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi informasi yang adaptif dan modern.

q. Program Permukiman Idaman Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk fasilitasi penyediaan rumah murah dan layak huni, yang disertai dengan meningkatkan kualitas permukiman di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan kegiatan utama peningkatan kualitas jalan lingkungan, penyediaan penerangan jalan umum, perluasan cakupan air bersih, penyediaan energi baru terbarukan, rumah ibadah, drainase, dan ruang terbuka hijau/taman/permakaman. Untuk mendukung penyediaan permukiman yang layak di wilayah perkotaan, adapun proyek prioritas yang dilaksanakan dalam periode kepemimpinan adalah:

a. Penataan Permukiman Tepi Sungai;

- b. Fasilitasi Kerjasama dengan Pengembang Perumahan Yang Terjangkau Bagi Korban Bencana/Relokasi dan Masyarakat yang Termasuk Kategori Berpendapatan Rendah.
- c. Penyediaan energi listrik dan air bersih berbasis perdesaan di wilayah wilayah yang belum terjangkau PLN dan PDAM, sebagai pengembangan Program Terang Kampongku dan Program Air Bersih Desa.

Keterhubungan Terhadap Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2030

- Misi 3 : Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur sipil negara di tingkat kecamatan, diperlukan upaya terpadu dalam beberapa aspek. Ini mencakup implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kompetensi aparatur, perbaikan tata laksana, dan penguatan manajemen SDM.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Implementasi SPBE:
 - a. Pemerintah perlu menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE yang terencana dan terpadu.
 - b. Peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap arah kebijakan SPBE dan implementasi teknisnya.
 - c. Transformasi menuju pemerintahan digital yang efisien dan terintegrasi.
2. Peningkatan Kompetensi Aparatur:

- a. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme ASN.
 - b. Penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, objektif, dan akuntabel.
 - c. Peningkatan kesadaran tentang keberagaman, toleransi, dan kewarganegaraan.
3. Perbaikan Tata Laksana:
- a. Penyusunan tata naskah dinas yang baik untuk kelancaran komunikasi tertulis dan efisiensi administrasi.
 - b. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik.
 - c. Penguatan manajemen organisasi dan sumber daya manusia untuk efektivitas administrasi.
4. Penguatan Manajemen SDM:
- a. Pengembangan database kepegawaian yang akurat.
 - b. Penataan dan redistribusi pegawai sesuai kebutuhan.
 - c. Penyusunan standar kompetensi dan pengembangan diklat berbasis kompetensi.
 - d. Peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan yang adil.
5. Koordinasi dan Kolaborasi:
- a. Peningkatan sinergisitas antar ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - b. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak dalam pelaksanaan SPBE dan transisi menuju pemerintahan digital.

Dengan melaksanakan upaya-upaya di atas, diharapkan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan

lebih baik, profesionalisme SDM aparatur sipil negara meningkat, dan pelayanan publik menjadi lebih optimal.

- Misi 5 : Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan diwilayah Kecamatan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan diwilayah Kecamatan adalah:

1. Perencanaan Wilayah yang Partisipatif dan Inklusif :
 - a. Libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam proses perencanaan pembangunan wilayah.
 - b. Pastikan suara dan kebutuhan masyarakat terdengar dan terakomodasi dalam setiap tahapan perencanaan.
 - c. Gunakan pendekatan bottom-up, dimana inisiatif pembangunan berasal dari bawah dan didukung oleh pemerintah.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar :
 - a. Prioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
 - b. Pastikan ketersediaan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah.
 - c. Tingkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

- a. Fokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan.
 - b. Berikan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh dan berkembang.
 - c. Ciptakan lapangan kerja yang berkualitas di berbagai sektor ekonomi.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
- a. Prioritaskan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
 - b. Lakukan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan.
 - c. Lindungi kawasan konservasi dan ekosistem penting.
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
- a. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah.
 - b. Berikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
 - c. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan.
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan:
- a. Pastikan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
 - b. Ciptakan birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
7. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan:

- a. Lakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembangunan.
- b. Evaluasi secara berkala dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- c. Lakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, diharapkan pembangunan kewilayahan di Kecamatan dapat berjalan lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup di wilayah Kecamatan adalah Proses evaluasi dan analisis terhadap rencana tata ruang wilayah kecamatan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan. Ini mencakup penilaian kesesuaian rencana dengan kondisi lingkungan, potensi dampak, serta upaya mitigasi dan pelestarian lingkungan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu :

- Kegiatan Pasca Tambang Belum Dilakukan dengan Baik

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama tambang batubara, meninggalkan banyak lahan dengan karakteristik pasca tambang yang merusak. Lubang besar, penurunan muka tanah, dan potensi longsor menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan lingkungan hidup. Proses reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban belum terlaksana optimal, menyebabkan gangguan ekologis jangka panjang serta

memperparah kerusakan lahan dan menurunkan nilai produktivitas wilayah.

- **Kerusakan Hutan Dan Lahan**

Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tingkat kerusakan hutan dan perubahan lahan yang cukup tinggi. Penebangan liar, perambahan lahan, dan kegiatan pertambangan ilegal menjadi penyebab utama degradasi kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 83% dari total wilayah kabupaten. Dari kawasan ini, sekitar 52% merupakan hutan produksi yang semestinya dijaga keberlanjutannya. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan ekosistem hutan rentan rusak dan kehilangan fungsi ekologis

- **Perubahan Lingkungan Sekitar Perairan Sungai dan Danau**

Perubahan lingkungan juga terlihat nyata di wilayah perairan, pesisir, dan danau. Ekosistem mangrove di Delta Mahakam rusak parah, menyebabkan abrasi meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Intrusi air laut di DAS Mahakam memperburuk kualitas air minum masyarakat. Di wilayah 3 danau (Jempang, Semayang, dan Melintang), menurunnya vegetasi air, kualitas air yang tercemar, serta pendangkalan sungai telah mengganggu sistem hidrologi dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan permukiman dan konversi lahan yang tidak terkendali.

- **Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang perlu segera diantisipasi. Banyak lahan pertanian produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralih menjadi kawasan tambang, industri, maupun permukiman tanpa perencanaan yang komprehensif. Hal ini mengancam ketahanan pangan daerah

dan menurunkan daya dukung lingkungan. Ketidadaan regulasi spesifik di tingkat kabupaten mengenai pembatasan alih fungsi lahan memperburuk kondisi, dan menyebabkan konflik ruang serta ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sektor Sumber Daya Alam	Permasalahan Lingkungan Hidup	Degradasi Lingkungan	Perubahan Iklim	Dampak Pembangunan IKN	Pencemaran Sungai	Dampak dan Peluang IKN
Pertanian dan Perkebunan	Permasalahan Sosial-Ekonomi	Daya Dukung Lingkungan			Masalah Sampah dan Banjir	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Perikanan dan Kelautan	Permasalahan Infrastruktur dan Pelayanan Publik	Pentingnya pembangunan Berkelanjutan				Peningkatan Infrastruktur
Peternakan	Permasalahan Sumber Daya Alam					Kemiskinan dan Stunting

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kehutanan						Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Pertambangan dan Industri						Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan hasil telaahan data, kondisi eksisting, dan analisis komprehensif terhadap lingkungan internal maupun eksternal Perangkat Daerah, serta dengan mempertimbangkan hasil analisis pada Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD, berikut diuraikan secara lebih rinci mengenai potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang relevan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja untuk periode 2025-2029. Pembahasan ini mencakup aspek lingkungan, baik dalam skala global, nasional, maupun regional, yang akan memengaruhi arah perencanaan ke depan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD (Kecamatan Samboja)

Kecamatan Samboja Memiliki potensi yang sangat beragam dan strategis, diantaranya :

Sektor Sumber Daya Alam :

- **Pertanian dan Perkebunan:** Potensi besar sebagai lumbung pangan dengan komoditas seperti padi, nanas, sayuran, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, dan buah naga. Didukung keberadaan Waduk Samboja sebagai

sumber irigasi vital dan adanya Kelompok Joglo Tani di Kelurahan Sanipah.

- **Perikanan dan Kelautan:** Merupakan penghasil ikan laut terbesar di Kutai Kartanegara (sekitar 26% dari total produksi ikan laut Kukar) dan sentra budidaya rumput laut terbesar (sekitar 49% dari total produksi rumput laut Kukar), terutama di wilayah pesisir seperti Tanjung Harapan, Kuala Samboja, Teluk Pemedas, dan Muara Sembilang.
- **Peternakan:** Potensi untuk sapi potong, ayam potong, ayam buras, dan kambing.
- **Kehutanan:** Memiliki Kawasan dengan flora dan fauna, potensi wisata alam yang berada pada wisata Bekantan Sungai Hitam.
- **Pertambangan dan Industri:** Keberadaan industri gas, minyak, batu bara, ternak potong, dan pengolahan limbah minyak.

Sektor Pariwisata : Destinasi alam menarik seperti Wisata Bekantan Sungai Hitam, Pantai Tanah Merah, Pantai Tanjung Harapan, Waduk Samboja, Kaltim Park, Pantai Teluk Pemedas, Pantai Sanipah, Coconut Beach, Believe Beach dan Wisata Like View Samboja.

Memiliki Posisi Strategis : Terletak di wilayah timur Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar. Sebagian wilayah Kecamatan Samboja juga telah ditetapkan sebagai bagian dari delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) baru Indonesia,

membuka peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik di masa depan

Permasalahan Perangkat Daerah (Kecamatan Samboja)

- **Permasalahan Lingkungan Hidup**, Pencemaran Sungai Merdeka akibat limbah pertambangan batubara ilegal yang menyebabkan air baku PDAM keruh dan berbau, berdampak pada kesehatan masyarakat, Pencemaran udara dari bau tak sedap pabrik pengolahan limbah B3, Kerusakan ekosistem akibat penambangan batubara ilegal di sekitar Waduk Samboja.
- **Permasalahan Sosial Ekonomi**, Tingkat kemiskinan yang tinggi (termasuk yang tertinggi di Kukar), meskipun adanya keragaman sumber penghasilan, Tingginya prevalensi stunting, dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pendatang dan tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan dan gizi yang memadai.
- **Permasalahan Infrastruktur dan Pelayanan Publik** : Kondisi infrastruktur jalan yang buruk (banyak lubang, berlumpur saat hujan), terutama jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Minimnya fasilitas pendidikan (khususnya SD) yang belum memadai, memaksa anak-anak bersekolah di kecamatan lain yang jaraknya jauh. Sebagian masyarakat masih belum memperoleh pelayanan kesehatan secara layak karena program BPJS yang belum optimal. Keterlambatan pemekaran Kecamatan Samboja Barat akibat masalah administratif (pengisian aparatur dan revisi perda).
- **Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM)** : Rendahnya kualitas SDM di beberapa sektor yang memengaruhi

kemampuan penyerapan informasi, terutama terkait isu-isu pembangunan strategis seperti IKN.

Isu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang relevan dengan PD

- **Degradasi Lingkungan:** Pembangunan intensif berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hutan, ancaman terhadap habitat satwa liar (orangutan, bekantan, pesut), gangguan tata air, dan risiko pencemaran (air, udara, sedimen).
- **Daya Dukung Lingkungan:** Adanya kekhawatiran tentang daya dukung lingkungan yang terbatas, terutama ketersediaan air, dan kemampuan wilayah untuk menampung beban pembangunan yang masif.
- **Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan:** KLHS menekankan perlunya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

- **Aspek Global:** Intinya adalah dampak perubahan iklim (seperti banjir, kekeringan) dan tekanan dari permintaan pasar dunia untuk sumber daya alam (misal: sawit, batubara) yang memengaruhi lingkungan Samboja.
- **Aspek Nasional:** Intinya adalah dampak besar dari pembangunan IKN (misal: perubahan lahan, peningkatan sampah, tekanan penduduk) dan pengaruh kebijakan nasional terkait energi/lingkungan terhadap Samboja.

- **Aspek Regional:** Intinya adalah masalah lingkungan lokal dan antar wilayah seperti pencemaran sungai, masalah sampah, dan kejadian banjir yang sering terjadi di sekitar Samboja dan Kalimantan Timur.
- **Pengelolaan Sampah:** Volume sampah yang tinggi (sekitar 35,7 ton per hari) dengan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai, kurangnya regulasi pengelolaan sampah, dan adanya tempat pembuangan sampah ilegal.
- **Kualitas Air Sungai:** Penurunan kualitas mutu air Sungai Samboja yang dikategorikan "tercemar sedang" hingga "tercemar parah" di beberapa titik, mengancam ketersediaan air bersih.
- **Banjir:** Permasalahan banjir yang masih sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak perubahan tata guna lahan atau dampak pembangunan infrastruktur yang kurang terencana (termasuk yang terkait IKN, seperti longsor dan jalan terbelah).

Isu Strategis Perangkat Daerah (Kecamatan Samboja)

- **Dampak dan Peluang IKN:** Meskipun masuk delineasi IKN, pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah pusat belum signifikan, sementara pengembangan SDM sudah mulai dilakukan. Ada ketidakjelasan peralihan tanggung jawab pembangunan dari Pemkab ke Pemerintah Pusat, sehingga pembiayaan dan pembangunan masih ditangani Pemkab Kukar. Hal ini menimbulkan tantangan koordinasi dan pemanfaatan peluang IKN secara optimal.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (excellent service)

yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.

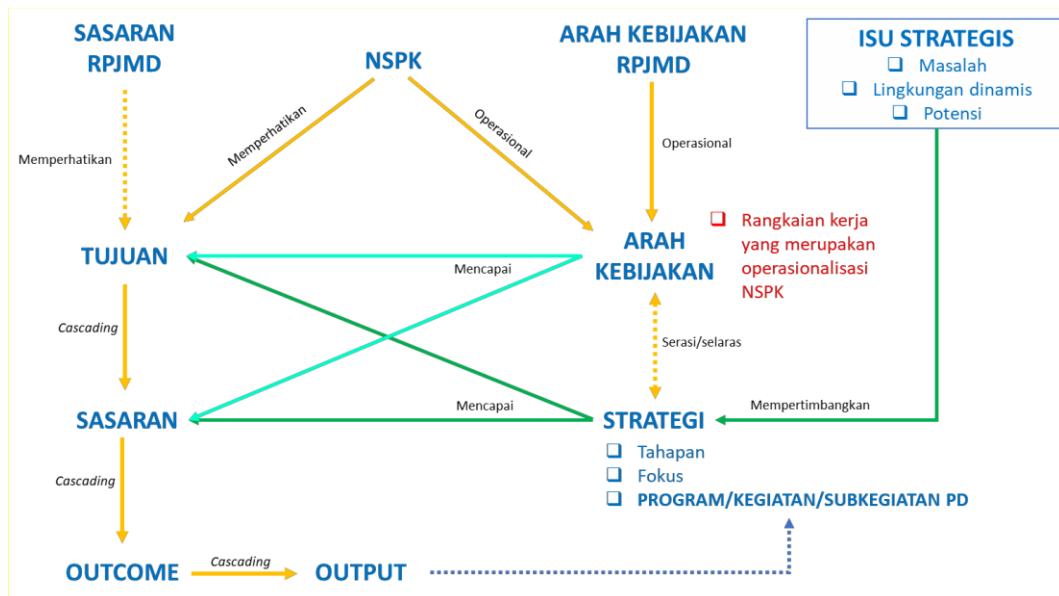
- **Peningkatan Infrastruktur:** Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
- **Kemiskinan dan Stunting:** Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif.
- **Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan:** Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batubara), dan memastikan kelestarian ekosistem.
- **Tata Kelola Pemerintahan:** Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis—termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional—dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Samboja memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Samboja. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi yang jelas, serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai

pembangunan Kecamatan Samboja yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029.

Berdasarkan telaahan RPJMD dan penentuan isu strategis Perangkat Daerah, maka Renstra Perangkat Daerah dapat disusun berdasarkan konsep seperti gambar berikut ini :

Gambar 6.Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SAMBOJA

Tujuan adalah pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan tujuan ini Kecamatan Samboja telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Kecamatan Samboja menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu ” ***Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan***”. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu ” ***Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara***.” Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samboja, dalam hal ini Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menghasilkan perencanaan

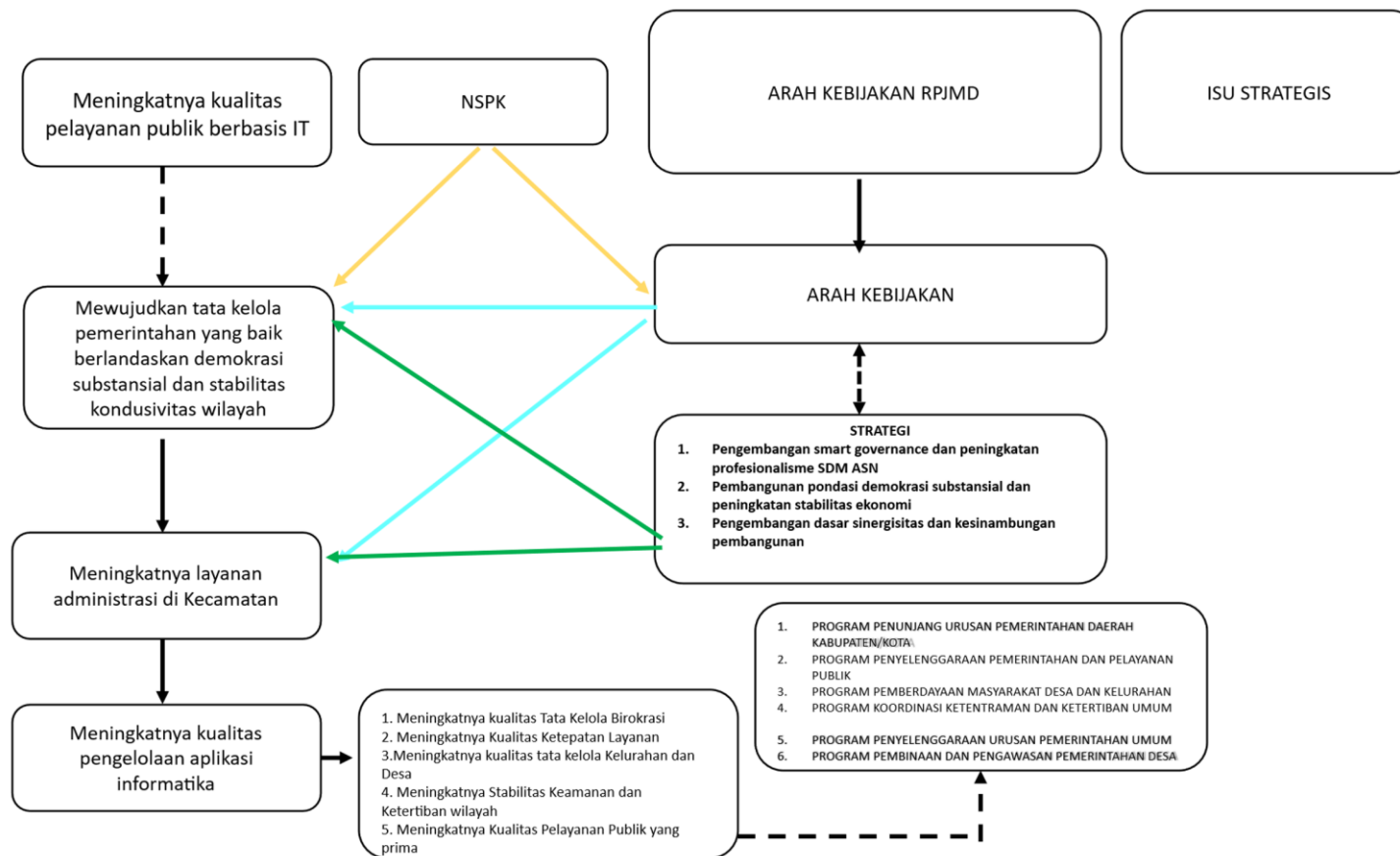
pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai.

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN SAMBOJA

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Samboja menetapkan sasaran strategi ”

Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Samboja tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Samboja yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

- Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
- Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
- Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
- Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	89,45	90,05	90,38	92,95	95,94	98,13	98,13	
		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	n/a	78	81	84	87	90	90	
			Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan	n/a	82,63	85,11	87,59	90,07	92,55	92,55	

STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Samboja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

- VISI (RPJMD) : “KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**
- MISI 3 (RPJMD) : Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Layanan Administrasi Di Kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara . Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Samboja sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Samboja:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan SDM dan Peningkatan Efektivitas Perlindungan Sosial	Pengembangan Ekonomi Sektor Unggulan Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata	Pemantapan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pendapatan Masyarakat Berkualitas	Perwujudan Kukar yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN SAMBOJA TAHUN 2025-2029.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap.

Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Samboja sebagai berikut :

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan yang Prima	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Implementasi standar pelayanan dan digitalisasi pelayanan di tingkat kecamatan	Melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Implementasi pelayanan prima berbasis digital	Kecamatan sebagai pelaksana layanan dasar
3	Pembinaan dan pengawasan Administrasi desa	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Fasilitasi capaian program prioritas pembangunan daerah	Dilakukan melalui monitoring dan laporan realisasi
4	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan desa	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Kecamatan sebagai pengawas teknis pelaksanaan DD	Dilakukan melalui tim teknis kecamatan
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Penguatan kewenangan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan sektor teknis	Menyesuaikan dengan pelimpahan urusan dari bupati

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Samboja ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Samboja adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan merupakan Program untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam prosesnya.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur di masyarakat, melalui koordinasi berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan aman, sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dengan adanya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program yang bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan tidak termasuk dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah atau instansi vertikal. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Program ini berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Samboja adalah sebagai berikut

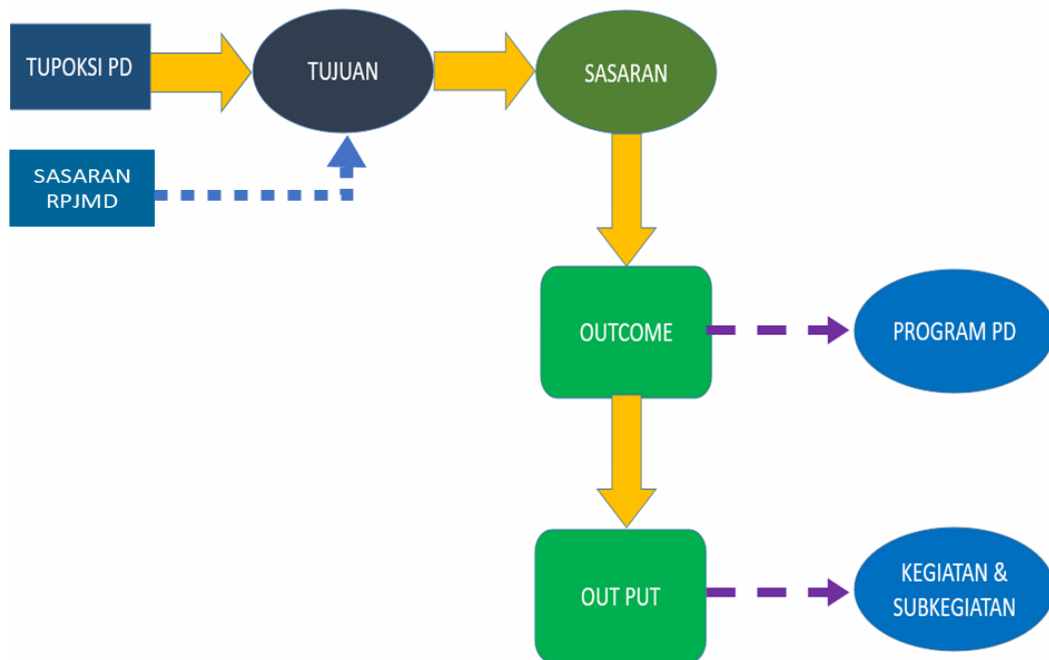
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

15. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
17. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
18. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
20. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
21. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samboja merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Samboja merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

Kecamatan Samboja serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samboja dijelaskan pada gambar dibawah ini

**Gambar4.1 Kerangka Perumusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**



**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan layanan administrasi di Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelayanan kewilayahan di kecamatan				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan		

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Peningkatan kepuasan masyarakat, efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta peningkatan citra pemerintah	Peningkatan kualitas serta efisiensi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh kantor kecamatan Samboja	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik		
					Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan		
			Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program
			Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan keuangan yang tersusun dan terdokumentasi	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
			Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan lengkap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan
			Meningkatnya koordinasi dan efisiensi dalam penyusunan anggaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan koordinasi penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan
			Meningkatnya koordinasi dan efisiensi dalam penyusunan anggaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan koordinasi penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
			Meningkatnya koordinasi dan efisiensi dalam penyusunan anggaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan koordinasi penyusunan DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Capaian dan realisasi kinerja dapat dimonitor dan dievaluasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan
			Kinerja perangkat daerah dapat ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
			Tersedianya data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan dan diperiksa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan keuangan yang tersusun dan terdokumentasi	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
			Kesejahteraan ASN terjamin melalui penggajian tepat waktu	Daftar ASN penerima gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
			Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan
			Tersedianya laporan keuangan tahunan yang akurat	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan hasil koordinasi penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya laporan realisasi keuangan periodik	Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan hasil koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
			Tersedianya pelaporan dan analisis prognosis anggaran secara rutin	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan
			Terjaminnya pengamanan aset barang milik daerah	Jumlah dokumen pengaman an barang milik daerah yang terdokum entasi	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministr asikan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiata n
			Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan barang daerah	daftar rencana kebutuhan barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
			Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen BMD yang di amankan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersusunnya hasil penilaian barang milik daerah secara tepat dan akurat	Laporan hasil penilaian barang dan koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
			Tersedianya data hasil rekonsiliasi barang milik daerah SKPD	Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian yang tertib	Pegawai mendapatkan pelayanan administrasi secara menyeluruh	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan
			Tersedianya pakaian dinas dan atribut yang sesuai kebutuhan ASN	Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kompetensi ASN sesuai tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan berbasis tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kompetensi ASN sesuai tugasnya	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan
			<i>Terselenggaranya layanan administrasi umum secara optimal</i>	<i>Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</i>	<i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
			Tersedianya fasilitas instalasi listrik dan penerangan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dan berfungsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
			Tersedianya peralatan kerja kantor yang mendukung operasional	Peralatan dan perlengkapan kantor disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
			Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor	Peralatan rumah tangga disediakan secara lengkap	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
			Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk mendukung operasional kantor	Bahan logistik kantor disediakan tepat waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan dokumen	Barang cetakan dan penggandaan tersedia sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan
			Terfasilitasinya penerimaan tamu secara formal	Laporan fasilitas kunjungan tamu tersedia	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan
			Terlaksananya rapat koordinasi antar perangkat daerah	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
			Teradministrasikannya arsip dinamis secara tertib	Dokumen arsip dinamis yang dikelola dan terdokumentasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan
			Terlaksananya SPBE di lingkungan SKPD secara optimal	Dokumen dukungan pelaksanaan SPBE tersedia	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan
			<i>Tersedianya barang milik daerah untuk mendukung operasional pemerintahan</i>	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
			Tersedianya Mebel	paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
			Tersedianya gedung kantor atau bangunan lain untuk aktivitas pemerintahan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
			Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang lengkap	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
			Tersedianya sarpras pendukung yang menunjang kenyamanan dan layanan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Waktu penyediaan jasa yang tercatat dan terdokumentasi	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
			Terpenuhinya layanan surat-menysurat pemerintahan	Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan
			Terpenuhinya layanan komunikasi dan infrastruktur dasar kantor	Laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
			Terselenggara layanan operasional kantor secara umum	Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
			Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan perangkat daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kendaraan dinas jabatan/perorangan tetap operasional dan legal	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
			Kendaraan operasional dinas dalam kondisi layak dan legal	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara dan dibayar pajak/ perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
			Peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
			Gedung kantor tetap layak pakai dan nyaman	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
			Sarana kantor tetap fungsional	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sarpras pendukung tetap tersedia dan berfungsi	Jumlah sarpras pendukung yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase pelayanan sesuai SOP	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program
			Meningkatnya keterjangkauan pelayanan publik	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan		
			Terlaksananya sinergi antarinstansi dalam kegiatan pemerintahan	Jumlah kegiatan pemerintahan lintas sektor	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya koordinasi dan integrasi perencanaan kegiatan	Laporan koordinasi /sinergi kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaa dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan
			<i>Terselenggara nya pelayanan minimal sesuai ketentuan</i>	<i>Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi</i>	<i>Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi</i>	<i>Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Kegiatan</i>
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
			Terlaksananaya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan
			Tersedianya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal	Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sub Kegiatan
			Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai kewenangan Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Sub Kegiatan
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan
			Terselenggara koordinasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah koordinasi kegiatan desa/kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program
			Terselenggara koordinasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah koordinasi kegiatan desa/kelurahan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	Laporan kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
			<i>Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Koordinasi kegiatan desa/kelurahan</i>	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Kegiatan
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan
			Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di Desa / Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kegiatan
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan Lembaga Masyarakat yang diselenggarakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat yang disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Sub Kegiatan
			Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas camat	Persentase atau cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dan komunitas lokal untuk menjaga keamanan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
			Terjaganya hubungan harmonis antarumat beragama dan tokoh masyarakat	Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan
			Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas camat	Persentase atau cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Terselenggara nya pelayanan urus an pemerintahan umum sesuai kewenangan</i>	<i>Jumlah urus an pemerinta han umum yang dilaksana kan</i>	<i>Jumlah Urus an Pemerintaha n yang dilaksanaka n Kecamatan</i>	<i>Penyelenggara an Urus an Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kegiatan
			Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Meningkatnya stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan kerukunan	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi lintas unsur dalam mendukung tugas pemerintahan kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi tugas Forkopimc am	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan desa	Persentas e desa dengan kinerja pemerinta han kategori baik	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelengga raan kinerja pemerintaha n Desa dalam kategori baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Terfasilitasi ya desa dalam aspek pemerintahan dan kelembagaan</i>	<i>Jumlah desa yang difasilitasi</i>	<i>Jumlah Desa Yang difasilitasi</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kegiatan
			Terselenggara ya pengelolaan keuangan dan aset desa secara akuntabel	Dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Sub Kegiatan
			Terlaksananya pemilihan kepala desa yang demokratis dan tertib	Dokumen fasilitasi pelaksanaan pilkades	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sub Kegiatan
			Terselenggara ya koordinasi pendampingan desa secara efektif	Laporan hasil koordinasi pendampingan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan

4.1.1 PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima)

tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dibawah ini : :

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN : NON URUSAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	77	24.158.181.157	77	26.628.659.082	77	27.263.659.082	77	27.533.659.082	77	27.793.659.082	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	17	605.000.000	17	650.000.000	17	675.000.000	17	675.000.000	17	675.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	n/a	1 Dolumen	15.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	1 Dolumen	15.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	1 Dolumen	15.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	n/a	1 Dolumen	15.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	1 Dolumen	17.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	75.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	n/a	11 Data	300.000.000	11 Data	302.000.000	11 Data	327.000.000	11 Data	327.000.000	11 Data	327.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	25.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	7 Laporan	21	16.168.659.082	21	16.168.659.082	21	16.168.659.082	21	16.168.659.082	21	16.168.659.082	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1148 Orang	2982 Orang	15.495.939.082	2982 Orang	15.495.939.082	2982 Orang	15.495.939.082	2982 Orang	15.495.939.082	2982 Orang	15.495.939.082	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	652.720.000	12 Laporan	652.720.000	12 Laporan	652.720.000	12 Laporan	652.720.000	12 Laporan	652.720.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	2 Laporan	9863 Unit	350.000.000	9863 Unit	350.000.000	9863 Unit	350.000.000	9863 Unit	350.000.000	9863 Unit	350.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	n/a	4 Laporan	27.000.000	4 Laporan	27.000.000	4 Laporan	27.000.000	4 Laporan	27.000.000	4 Laporan	27.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	20 orang	100	250.000.000	0	300.000.000	70	350.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	11 Paket	150.000.000	11 Paket	150.000.000	11 Paket	150.000.000	11 Paket	150.000.000	11 Paket	150.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	25 Orang	50.000.000	30 Orang	75.000.000	35	100.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	25 Orang	50.000.000	30 Orang	75.000.000	35	100.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	6 Layanan	9 Layanan	1.873.121.075	9 Layanan	3.350.000.000	9 Layanan	3.600.000.000	9 Layanan	3.750.000.000	9 Layanan	3.800.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	59 Paket	11 Paket	131.871.000	11 Paket	131.871.000	11 Paket	131.871.000	11 Paket	150.000.000	11 Paket	150.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	107 Paket	1 Paket	50.000.000	11 Paket	170.000.000	11 Paket	250.000.000	11 Paket	250.000.000	11 Paket	250.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	3 Unit	35.000.000	15 Unit	120.000.000	22 Unit	250.000.000	22 Unit	250.000.000	22 Unit	250.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	202 Paket	22 Paket	411.473.000	22 Paket	700.000.000	22 Paket	700.000.000	22 Paket	750.000.000	22 Paket	750.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	79 Paket	11 Paket	115.287.075	11 Paket	250.000.000	11 Paket	250.000.000	11 Paket	250.000.000	11 Paket	250.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n/a	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	718 Laporan	718 laporan	1.054.490.000	980 Laporan	1.828.129.000	1020 Laporan	1.858.129.000	1040 Laporan	1.895.000.000	1200 Laporan	1.945.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	65.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	n/a	36	813.973.200	66 Unit	1.500.000.000	82	1.800.000.000	79	2.000.000.000	79	2.200.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	1 Unit	180.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	11 Paket	150.000.000	11 Paket	150.000.000	11 Paket	350.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	30 Unit	133.973.200	60 Unit	670.000.000	60 Unit	800.000.000	65 Unit	1.000.000.000	65 Unit	1.000.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	1 Unit	150.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	1 Unit	150.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah UnitSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	1 Unit	150.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	3.764.850.000	12 Bulan	3.850.000.000	12 Bulan	3.850.000.000	12 Bulan	3.850.000.000	12 Bulan	3.850.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.229.850.000	12 Laporan	2.315.000.000	12 Laporan	2.315.000.000	12 Laporan	2.315.000.000	12 Laporan	2.315.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	99 Unit	68 Unit	332.577.800	73 Unit	460.000.000	78	470.000.000	78	490.000.000	81	500.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	n/a	2 Unit	30.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3 Unit	30.000.000	3 Unit	45.000.000	3 Unit	45.000.000	3 Unit	45.000.000	3 Unit	45.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	85 Unit	50	81.802.800	55	95.000.000	60	105.000.000	60	105.000.000	63	115.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	18 Unit	11 Unit	160.775.000	11 Unit	235.000.000	11 Unit	235.000.000	11 Unit	235.000.000	11 Unit	235.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	n/a	1 Unit	15.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	n/a	1 Unit	15.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100	10.820.000.000	100	10.820.000.000	100	10.820.000.000	100	10.820.000.000	100	10.820.000.000	
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen	100		100		100		100		100		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	n/a	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	n/a	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	n/a	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	n/a	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	n/a	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	275.000.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	n/a	6 Kali	320.000.000	6 Kali	320.000.000	6 Kali	320.000.000	6 Kali	320.000.000	6 Kali	320.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	n/a	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000		
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	n/a	2 Unit	250.000.000	2 Unit	250.000.000	2 Unit	250.000.000	2 Unit	250.000.000	2 Unit	250.000.000		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	516 Kegiatan	150	10.000.000.000	150	10.000.000.000	150	10.000.000.000	150	10.000.000.000	150	10.000.000.000		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	515 Laporan	40 Laporan	9.000.000.000	40 Laporan	9.000.000.000	40 Laporan	9.000.000.000	40 Laporan	9.000.000.000	40 Laporan	9.000.000.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	72,7 Persen	72,7	31.922.150.000	72,7	31.922.150.000	72,7	31.922.150.000	72,7	31.922.150.000	72,7	31.922.150.000		

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	n/a	6 Kali	350.000.000	6 Kali	350.000.000	6 Kali	350.000.000	6 Kali	350.000.000	6 Kali	350.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	350.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	80 Kegiatan	10 Kegiatan	15.294.150.000	10 Kegiatan	15.294.150.000	10 Kegiatan	15.294.150.000	10 Kegiatan	15.294.150.000	10 Kegiatan	15.294.150.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	95 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	45 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	45 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	45 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	45 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93 Unit	80 Unit	11.744.150.000	80 Unit	11.744.150.000	80 Unit	11.744.150.000	80 Unit	11.744.150.000	80 Unit	11.744.150.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	132 Pokmas/Ormas	50 Pokmas/Ormas	3.300.000.000	50 Pokmas/Ormas	3.300.000.000	50 Pokmas/Ormas	3.300.000.000	50 Pokmas/Ormas	3.300.000.000	50 Pokmas/Ormas	3.300.000.000	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	41 Kali	12 Kali	16.278.000.000	12 Kali	16.278.000.000	12 Kali	16.278.000.000	12 Kali	16.278.000.000	12 Kali	16.278.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	41 Lembaga Kemasyarakatan	41 Lembaga Kemasyarakatan	15.978.000.000	41 Lembaga Kemasyarakatan	15.978.000.000	41 Lembaga Kemasyarakatan	15.978.000.000	41 Lembaga Kemasyarakatan	15.978.000.000	41 Lembaga Kemasyarakatan	15.978.000.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	n/a	2 Lembaga	100.000.000	2 Lembaga	100.000.000	2 Lembaga	100.000.000	2 Lembaga	100.000.000	2 Lembaga	100.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	n/a	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	n/a	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	n/a	100 Persen	520.000.000	100 Persen	520.000.000	100 Persen	520.000.000	100 Persen	520.000.000	100 Persen	520.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	3 Kegiatan	520.000.000	3 Kegiatan	520.000.000	3 Kegiatan	520.000.000	3 Kegiatan	520.000.000	3 Kegiatan	520.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	n/a	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	n/a	2 Laporan	420.000.000	2 Laporan	420.000.000	2 Laporan	420.000.000	2 Laporan	420.000.000	2 Laporan	420.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	n/a	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	n/a	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi tugas Forkopimc am	n/a	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	n/a	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	n/a	3 Desa	350.000.000	3 Desa	350.000.000	3 Desa	350.000.000	3 Desa	350.000.000	3 Desa	350.000.000	
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaa n aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	n/a	11 Dokumen	250.000.000	11 Dokumen	250.000.000	11 Dokumen	250.000.000	11 Dokumen	250.000.000	11 Dokumen	250.000.000	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	n/a	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	
				68.120.331.157		70.590.809.082		71.225.809.082		71.495.809.082		71.755.809.082	

4.3 Sub Kegiatan Prioritas

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		Program
		<i>Terlaksananya a sinergi antarinstansi dalam kegiatan pemerintahan</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kegiatan</i>
		Terlaksananya koordinasi dan integrasi perencanaan kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		<i>Terselenggaranya pelayanan minimal sesuai ketentuan</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Kegiatan</i>
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
		<i>Terlaksanannya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Kegiatan</i>
		Tersedianya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sub Kegiatan
		Terlaksanannya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai kewenangan Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan		Program
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan
		Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan n lembaga di tingkat kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Sub Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas camat		Program
		<i>Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan</i>	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
		Terjaganya hubungan harmonis antarumat beragama dan tokoh masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas camat		Program
		<i>Terselenggaranya pelayanan urusan pemerintahan umum sesuai kewenangan</i>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Program
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan mandat kewenangan serta arah kebijakan pembangunan daerah. IKU menjadi alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan mendukung realisasi tujuan jangka menengah dinas. Penetapan IKU memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta kontribusi langsung terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Dengan demikian, keberadaan IKU dalam dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samboja sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samboja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	89,45	90,05	90,38	92.95	95.94	98,13	98,13	

4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau program, terutama dalam konteks pemerintahan dan pembangunan. IKK membantu mengukur pencapaian kinerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan.

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

Penetapan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan capaian kinerja atas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. IKK berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara konsisten dan terukur. Penetapan IKK disusun dengan mengacu pada ketentuan nasional serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah. Melalui IKK, diharapkan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja urusan pemerintahan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sepanjang periode perencanaan tahun 2025 hingga 2029, di jelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Samboja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	77	77	77	77	77	77	
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	
5	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja untuk periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat di wilayah Kecamatan Samboja, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Sebagai wilayah yang strategis dan dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Samboja dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan besar. Dokumen ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dengan cara yang terarah, efektif, dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta proyeksi masa depan, pelaksanaan kaidah berikut menjadi pedoman untuk Renstra Kecamatan Samboja Tahun 2025-2029:

1. Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Samboja 2025-2029 berisi rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok. Rumusan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

2. Pengendalian dan Pelaksanaan Renstra

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Samboja berada di bawah pengawasan langsung Camat Samboja, yang bertanggung jawab atas pengelolaan wewenang yang diberikan oleh Bupati. Camat didukung oleh Sekretaris Camat, Sub Bagian serta Kepala Seksi yang terdiri dari:

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan,
- Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian,
- Seksi Pemerintahan,
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),
- Seksi Kesejahteraan Sosial,
- Seksi Pelayanan Umum,

Struktur organisasi ini memastikan adanya sinergi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

3. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Rancangan Awal Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Samboja (Renja Kecamatan Samboja) setiap tahunnya. Penyusunan Renja akan tetap merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Sinkronisasi dengan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Samboja (RKA-Kecamatan Samboja) disusun berdasarkan pedoman Renja Kecamatan Samboja, untuk mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menjamin bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan kecamatan.

5. Fleksibilitas terhadap Perubahan Kebijakan

Apabila ada kebijakan anggaran baru yang relevan untuk Kecamatan Samboja namun tidak tercantum dalam Renstra ini, maka dokumen ini akan direvisi agar sejalan dengan dinamika kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ada.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Sistematis

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Samboja 2025-2029, yang dijabarkan dalam Renja tahunan, akan dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terstruktur. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kesimpulan

Kecamatan Samboja, dengan luas wilayah mencapai 284,925201km² dan populasi sebanyak 37.390 jiwa (data 2024), menghadapi tantangan besar dalam pembangunan wilayahnya. Potensi sumber daya alam, posisi strategis di pesisir selatan, serta kedekatan dengan IKN Nusantara menawarkan peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik.

RANWAL RENSTRA Kec Samboja 2025-2029

Namun, tantangan berupa tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur yang belum memadai, serta masalah sosial-ekonomi membutuhkan pendekatan yang holistik dan berbasis data.

Dengan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) ini, Kecamatan Samboja diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersifat inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah kecamatan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Samboja 2025-2029 ini disusun sebagai panduan strategis untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, demi mewujudkan Kecamatan Samboja yang lebih maju dan sejahtera.

Samboja, 2025

Camat



DAMSIK,SH.,M.Si

NIP. 196904142007011031